



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 10
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN
DAN KETAHANAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	X.1-1
I.1 Latar Belakang.....	X.1-1
I.2 Pokja Keamanan, Ketertiban, dan Ketahanan Masyarakat.....	X.1-3
BAB II UPAYA MENUJU PERDAMAIAN.....	X.2-1
II.1 Konflik Kekerasan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).....	X.2-1
II.2 Upaya Perdamaian.....	X.2-2
BAB III KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PASKA BENCANA DAN PERAN TNI-POLRI DALAM PENANGANAN DAMPAK BENCANA.....	X.3-1
BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN	X.4-1
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT.....	X.5-1
V.1 Empat Tatanan Nilai Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan Masyarakat.....	X.5-1
V.2 Kebijakan Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan.....	X.5-1
V.3 Strategi Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan.....	X.5-2
V.3.1 Strategi Keamanan dan Ketertiban.....	X.5-2
V.3.2 Strategi Ketahanan Masyarakat.....	X.5-2
BAB VI RENCANA PROGRAM.....	X.6-1
VI.1 Penciptaan Rasa Aman Masyarakat.....	X.6-1
VI.2 Pengembangan Ketahanan Masyarakat.....	X.6-5
BAB VII INDIKASI PEMBIAYAAN PROGRAM BIDANG K3M.....	X.7-1

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran I	Daftar Penilaian Kerusakan dan Kerugian Prasarana Bidang K3M
Lampiran II	Support Logistik TNI AU dan TNI AL
Lampiran III	Peta Trend Situasi Keamanan NAD Paska Tsunami
Lampiran IV	Keterkaitan Program Kerja Bidang K3M dengan Pokja Lainnya
Lampiran V	Penjadwalan dan Indikasi Pembiayaan Program-Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang K3M
Lampiran VI	Peta Kabupaten Prioritas Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Lampiran VII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang K3M Per Kabupaten
Lampiran VIII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang K3M Per Kegiatan
Lampiran IX	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang K3M Per Instansi

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004 lalu pada pukul 07.58 WIB terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 9,0 Skala Richter dengan pusat gempa berada di perairan laut Meulaboh yaitu sekitar 66 kilometer sebelah selatan Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat atau tepatnya di 2,9^o LU, 95,6^o BT dan dengan kedalaman gempa 20 KM. Gempa tersebut kemudian diikuti dengan gelombang tsunami yang merupakan gelombang terbesar dalam 100 tahun terakhir sehingga mengakibatkan kerusakan serius di 15 negara di Asia. Untuk Indonesia, gelombang tsunami mengakibatkan sebagian besar wilayah propinsi NAD dan Pulau Nias mengalami kerusakan yang maha dahsyat. Karena Acehlah yang paling menderita akibat bencana, maka Aceh kembali menjadi fokus perhatian masyarakat internasional di dalam konteks korban tsunami.

Tiga bulan berselang, tepatnya tanggal 28 Maret 2005 pukul 23.09 WIB bencana gempa bumi tektonik berkekuatan 8,2 Skala Richter melanda lagi di wilayah pantai barat Sumatra, dengan pusat gempa di 2.1^o LU-97,0^o BT di laut antara Pulau Semelu dan Pulau Nias berjarak 90 km arah tenggara Sinabang (Ibukota Simelue).

Kedua bencana alam yang luar biasa tersebut, tentu saja telah telah memakan puluhan ribu korban nyawa di Aceh dan sejumlah ribuan korban nyawa di Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan data dari Posko Penanggulangan Bencana Depsos, Depdagri RI dan Bakornas PBP pada pertengahan Januari (Laporan Bencana Tsunami 26 Desember 2004) menunjukkan bahwa jumlah korban yang meninggal dunia akibat gelombang Tsunami tersebut, mencapai 166.520 jiwa dan 6.377 jiwa hilang. Adapun jumlah pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumut telah mencapai jumlah 613.232 orang, sehingga pada saat ini lebih dari 15 % penduduk NAD hidup di pengungsian.

Kemudian, berdasarkan laporan dari Bakornas PBP mengenai korban bencana gempa bumi di Pulau Nias 28 Maret 2005 lalu, menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal yang telah dievakuasi hingga 30 Maret 2005 pukul 18.00 adalah: 269 jiwa di Gunung Sitoli (Kab. Nias), 100 jiwa di Teluk Dalam (Nias Selatan), 1 orang di Kota Sibolga, 12 jiwa di Kabupaten Simelue (NAD) dan 1 jiwa meninggal di Kabupaten Aceh Timur. Dilaporkan pula, terdapat 2000 orang warga Nias harus menjadi pengungsi karena segala sarana dan prasarana hancur akibat gempa tersebut, dan Satkorlak PBP Prov. NAD melaporkan pengungsi di daratan Singkil sekitar 16.500 jiwa, dan di Pulau Banyak sekitar 1.500 jiwa.

Selain korban jiwa, gempa bumi yang terjadi di Nias ini telah mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana yang cukup berarti, diantaranya (Laporan Bakornas PBP):

1. Di Kabupaten Nias (Gunung Sitoli):
 - 85% bangunan hancur, termasuk kerusakan fasilitas telekomunikasi dan listrik.
 - Enam buah jembatan di kota Gunung Sitoli Putus
 - Jalan dari lapangan terbang ke Kota Gunung Sitoli terputus dan sebagian besar infrastuktur air bersih rusak berat.
2. Kabupaten Nias Selatan (Teluk Dalam): 80% bangunan hancur, kerusakan total fasilitas telekomunikasi dan listrik. Sebagian besar infrastruktur air bersih rusak berat.

3. Kabupaten Tapanuli Tengah: beberapa rumah penduduk rusak
4. Kabupaten Tapanuli Selatan (Padang Sidempuan): beberapa rumah penduduk rusak dan sebuah jembatan putus
5. Kabupaten Mandailing Natal: beberapa rumah penduduk rusak dan 1 buah jembatan putus
6. Kota Medan retak-retak pada dinding bangunan dan beberapa kaca jendela pecah, Sebagian pembangkit di Belawan mengalami kerusakan karena Pompa BBM kemasukan lumpur.
7. Kabupaten Samosir : 41 rumah rusak berat, 26 rumah rusak, 2 unit sekolah rusak ringan, 1 buah museum di Kec Simanindo, 1 buah puskesmas pembantu di kec Sitiotio, 1 unit kantor Dinas Parhubungan di kec Pangururan mengalami rusak berat, 5 unit dermaga.

Dengan terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut, telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur seperti sarana komunikasi, transportasi, listrik, dan rumah penduduk, serta kantor-kantor pemerintahan, TNI, POLRI dan swasta. Kerusakan prasarana dan sarana publik dan pemerintahan ini telah mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan menjadi lumpuh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan situasi keamanan dalam kehidupan masyarakat melalui operasi terpadu dalam kondisi darurat sipil di Nangroe Aceh Darussalam, yakni Operasi Kemanusiaan, Operasi Pemulihan Ekonomi, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemulihan Pemerintah, dan Operasi Pemulihan Keamanan.

Secara umum kita melihat bahwa gangguan keamanan memang menurun secara signifikan dan jalannya pemerintahan lambat laun mulai pulih. Namun demikian setelah bencana alam tsunami, situasi keamanan mengalami perubahan bentuk yang cukup berbeda dengan adanya fenomena "GAM" yang justru memanfaatkan kegiatan tanggap darurat maupun rehabilitasi serta rekonstruksi. Dengan demikian jaminan keamanan adalah mutlak dan tidak mungkin pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik di dalam situasi yang tidak aman. Perbandingan kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Perbandingan Kondisi Sosial Masyarakat NAD
Masa Darmil, Darsip dan Paska Tsunami

NO	ITEM	KONDISI DI NAD PADA SAAT			
		AWAL DARMIL II	AWAL DARSIP I	AWAL DARSIP II	PASCA TSUNAMI
1	Jumlah Penggangguran	330.351	417.930	207.556	MENINGKAT
2	Jumlah Penduduk Miskin	1.703.897	1.254.227	1.157.300	MENINGKAT
3	Jumlah Penggungsi	7.140	2.661	973	613.232
4	Jumlah Kecamatan yang Kurang Berfungsi	45	0	0	172
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang Kurang/Tidak Berfungsi	1.370	780	314	1.550

Sumber : Laporan Desk NAD, Kantor Menko Polhukam

Di masa depan, meskipun masyarakat Aceh tengah mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai akibat bencana alam, upaya pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh harus diupayakan lebih tertata lagi sehingga kebersamaan dan kepercayaan masyarakat Aceh dengan Bangsa Indonesia lainnya menjadi semakin kuat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945

I.2. Pokja Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat

Untuk mengantisipasi dampak bencana alam serta dalam rangka merehabilitasi dan merekonstruksi sendi-sendi kehidupan di NAD dan Nias –Sumatra Utara-, Bappenas membentuk 10 (sepuluh) kelompok kerja (POKJA). Salah satu pokja tersebut adalah POKJA Bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat (K3M). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tugas dari Pokja K3M ini adalah :

- Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja bagi rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Nias - Sumatera Utara- dalam bidang K3M
- Memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan dan strategi pemanfaatan bantuan asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang K3M
- Mengkoordinasikan kerjasama antar departemen/lembaga terkait bidang K3M dalam rangka perolehan masukan dan informasi bagi formulasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana
- Mengkoordinasi dan memonitor pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dan Nias dalam program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam bidang K3M
- Mengkoordinasikan dan mensinergikan substansi yang disusun dengan Pokja K3M di daerah serta melakukan koordinasi dengan *expert* asing
- Menyiapkan dan merumuskan secara menyeluruh kebijakan dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang keamanan, ketertiban dan rekonsiliasi. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut dirinci ke dalam program dan kegiatan termasuk waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut selanjutnya akan dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

BAB 2

UPAYA MENUJU PERDAMAIAN

II. 1. Konflik Kekerasan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

Konflik kekerasan di Aceh setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga periode besar sejarah modern Aceh. Periode pertama adalah Perang Cumbok pada akhir tahun 40-an yang melibatkan dua kubu besar antara ulama dan bangsawan Aceh. Perang ini hanya berlangsung singkat di akhir tahun 40-an tetapi menimbulkan dampak pada perubahan pola hubungan dan struktur sosial di Aceh secara radikal. Faktor struktural penyebab konflik ini telah dimulai sejak lama ketika golongan ulama secara tegas mengambil sikap menentang Belanda sedangkan di sisi lain Belanda mampu mengkooptasi sebagian kalangan bangsawan (*ulee baling*) ke dalam dari struktur pemerintahan kolonial Belanda. Perbedaan cara pandang dan permusuhan semakin menyebar antara kedua kelompok itu dan puncaknya pada Agresi Belanda II ketika kaum bangsawan dianggap memiliki agenda tersembunyi untuk mengembalikan kekuasaan kolonial ke Aceh yang dipicu dengan insiden di sebuah desa kecil di Lamelhou, Pidie antara kelompok pendukung ulama dengan seorang bangsawan yang bernama Cumbok.

Periode kedua konflik kekerasan adalah gerakan Darul Islam (DI) yang dimotori golongan ulama yang mengakar di Aceh di bawah pimpinan Daud Bereuh. Golongan ini juga merupakan pihak yang memenangi Perang Cumbok. Konflik berlangsung hampir satu dekade (1956-1963) dan diselesaikan melalui tawaran otonomi terbatas bagi Aceh di bidang pendidikan, adat dan budaya serta pelaksanaan syariat Islam. Penyebab struktural dari konflik ini adalah hubungan ideologi yang bertolak belakang antara Aceh dan pemerintah pusat di Jakarta. Para ulama Aceh menganggap pemerintahan Jakarta korup dan tidak Islami yang dicitrakan melalui Soekarno yang dekat dengan komunis dan sekuler. Aceh yang merasa telah memberikan begitu banyak andil bagi kemerdekaan Indonesia merasa sangat tersinggung ketika Pemerintah Indonesia menempatkan Aceh berada di bawah wilayah administrasi Sumatera Timur.

Periode konflik ketiga adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan pada tahun 1974. Periode ini merupakan bagian dari periode konflik yang berlarut-larut dan berlangsung hingga saat ini. Periode ini sendiri terbagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama atau generasi penggerak awal dimotivasi oleh ketidakpuasan sekelompok orang di bawah pimpinan Hasan Tiro terhadap pengelolaan sumber minyak Arun yang tidak adil. Kelompok ini juga mendapat dukungan dari sisa-sisa DI yang juga kecewa terhadap implementasi kesepakatan damai otonomi terbatas Aceh. Gerakan ini mendapatkan respon yang sangat keras oleh pemerintah hingga awal tahun 80an gerakan ini sudah dapat dikatakan berhasil diredam dan sebagian dari mereka tertangkap atau terbunuh serta banyak yang melarikan diri dan menetap di Malaysia.

Generasi kedua GAM muncul pada akhir tahun 90-an. Menurut beberapa sumber, Hasan Tiro yang telah menetap di Swedia telah berhasil melakukan kerjasama dengan Libya untuk melatih beberapa orang Aceh untuk dilatih kemiliteran. Sepanjang akhir tahun 90-an banyak yang dari mereka yang telah dilatih pulang ke Aceh dan melakukan aksi sporadis terhadap kantor-kantor pemerintah dan juga aparat keamanan. Di tahun 1989, pemerintah Soeharto kembali menggelar operasi Jaring Merah yang kemudian menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) hingga tahun 1998. Selama masa DOM diindikasikan terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa di Aceh, dan masyarakat Acehlah yang paling menderita.

Generasi ketiga GAM muncul setelah pencabutan DOM di bawah pemerintahan baru, Presiden Habibie. Setelah DOM dicabut banyak dari anggota GAM yang saat diberlakukannya DOM melarikan diri ke Malaysia kembali ke Aceh dan menunggangi gerakan reformasi yang berkembang luas. Pelanggaran HAM yang terjadi saat DOM telah menimbulkan kebencian yang masif terhadap pemerintah pusat di Jakarta; diusung oleh Gerakan Aceh Merdeka sebagai titik tolak untuk meningkatkan identitas ke-Aceh-an (*ethnonasionalisme*). Isu ini lalu berhasil diartikulasikan oleh GAM dengan isu-isu laten yang berkembang di masyarakat Aceh seperti ideologi, kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan sehingga isu pemisahan diri dari NKRI diterima luas oleh masyarakat Aceh. Dengan demikian, dalam sejarah kehidupan masyarakat Aceh mereka selalu hidup dalam suasana konflik yang terus menerus.

II. 2. Upaya Perdamaian

Konflik yang terjadi di Aceh antara Gerakan Separatis Bersenjata Aceh-Gerakan Aceh Merdeka (GSBA-GAM) dengan Pemerintah telah berlangsung selama 27 tahun. Berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di Aceh telah banyak dilakukan oleh Pemerintah dan oleh berbagai pihak, namun sampai dengan saat ini perdamaian yang abadi di propinsi NAD nampaknya belum dapat terwujud.

Titik tolak pencapaian perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah di Aceh adalah dengan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM), dan kemudian dilanjutkan dengan penunjukan Henri Dunant Centre (HDC) sebagai pihak ketiga di dalam mencari penyelesaian Aceh secara tepat, damai dan demokratis. Pada tanggal 12 Mei 2000 dicetuskanlah “Kesepakatan Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh” yang mulai efektif dilaksanakan sejak Juni 2000 hingga September 2000, dan kemudian diperpanjang kembali hingga Januari 2001.

Pada awal pelaksanaan Jeda Kemanusiaan tersebut, telah terjadi penurunan tingkat kekerasan yang cukup signifikan. Namun, kesepakatan tersebut akhirnya tidak bertahan lama karena masing-masing pihak menuduh lawannya melakukan pelanggaran jeda kemanusiaan yang telah disepakati. Ketidakberhasilan Jeda Kemanusiaan terlihat dengan meningkatnya tingkat kekerasan pada akhir tahun 2000, dengan penduduk sipil selalu menanggung akibatnya.

Pada akhir Januari 2001, HDC kembali membawa kedua belah pihak ke Jenewa untuk membuat kesepakatan bersama yang memperhatikan masa depan politik, yakni adanya pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh, adanya sebuah komisi pemilihan yang independen yang dapat diterima kedua belah pihak, pemantauan terhadap proses pemilihan oleh sebuah badan yang independen dan tidak berpihak, peraturan yang menjamin bahwa calon non-partai dapat ikut serta dan bahwa partai daerah dapat dibentuk, serta kriteria yang memungkinkan GAM dan pendukung kemerdekaan sepenuhnya ikut serta dalam proses politik. Pelaksanaan kesepakatan sementara tersebut tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya sehingga kemudian pada tanggal 18 Maret 2001 kedua belah pihak kembali lagi ke Jenewa dan sepakat untuk mendirikan dua “Zona Keamanan” yang melingkupi dua kabupaten yang rawan kala itu yakni Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pihak GSBA-GAM telah melakukan penyerangan, pembunuhan, pembakaran dan tindakan kriminal lainnya dalam zona perdamaian tersebut.

Selanjutnya, proses pencapaian perdamaian Aceh masih terus berlanjut dengan dilakukan perjanjian *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) tanggal 9 Desember 2002, yang masih ditengahi oleh pihak HDC di Jenewa. Perjanjian ini dirancang untuk menghentikan kekerasan dan membentuk kerangka perdamaian yang kekal dengan mengedepankan 4 agenda utama, yaitu (1) Agenda bidang militer, (2) Agenda bantuan kemanusiaan, (3) Rekonstruksi, dan (4) Reformasi Sipil. Kesepakatan tersebut sedianya diawali dengan tahapan membangun kepercayaan selama dua bulan dari 9 Desember 2002 hingga 9 Februari 2003. Selama masa tersebut, kedua belah pihak akan memberi tahu seluruh ketentuan kesepakatan tersebut kepada masing-masing tentaranya secara cermat dan sepakat tidak menggunakan kekuatan militernya, baik personil maupun perlengkapan.

Pihak yang diberi mandat untuk memantau keadaan keamanan dan menyelidiki setiap pelanggaran adalah Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee/JSC*). Komite ini dipimpin secara *tripartite* yang terdiri dari seorang perwira senior dari militer Thailand yaitu Mayor Jendral Tanongsuk Tivinun; Brigadir Jendral Safzen Noerdin dari TNI; dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM. Selain memantau keadaan keamanan dan menyelidiki setiap pelanggaran yang terjadi, JSC juga bertugas menentukan "zona damai". Dalam zona damai ini, Pemerintah dan GAM dapat memelihara posisi bertahan, menghindari konfrontasi, serta melakukan persiapan bagi rekonstruksi dan bangunan kemanusiaan.

Zona damai yang pertama didirikan adalah di Indrapura (Kabupaten Aceh Besar). Pendirian zona damai dikatakan berhasil, sebab sebulan kemudian setelah dievaluasi tidak ada satu pun laporan mengenai pelanggaran di dalam zona tersebut. Kemudian, enam zona lagi diumumkan pada 9 Februari 2003 menjelang akhir pelaksanaan CoHA. Keenam zona damai yang dimaksud adalah di: (i) Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat; (ii) Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun; (iii) Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan; (iv) Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie; (v) Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara; dan (vi) Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak menyangdang senjata di dalam zona-zona tersebut serta tidak memindahkan pasukan baru ke dalam wilayah tersebut. Dari sisi keamanan dan ketertiban, pelaksanaan dari CoHA ini dapat dikatakan berhasil, yaitu dengan adanya penurunan drastis tingkat kekerasan dan kontak senjata.

Pembelajaran penting dari upaya perdamaian yang telah dilakukan pada masa jeda kemanusiaan yang dipimpin oleh HDC tersebut adalah rasa saling curiga tidak akan pernah berhasil mencapai perdamaian yang diharapkan. Dengan demikian, perlu dikembangkan suatu kerangka kesepakatan yang dapat mengikis rasa curiga, meningkatkan kepercayaan satu sama lain, dan yang lebih penting lagi adalah memberikan maaf terkait dengan kejadian masa lalu yang memang tidak bisa dihapuskan.

Pada akhirnya, pelaksanaan Perjanjian Penghentian Permusuhan/*Cessiassion of Hostilities Agreement* mengalami kegagalan yaitu dengan tidak diterimanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak pemerintah, khususnya mengenai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 2003 Tanggal 19 Mei 2003, Pemerintah melakukan kegiatan Operasi Terpadu yang bersifat penegakan kembali kedaulatan NKRI. Selain itu, operasi kemanusiaan, penegakan hukum, pemberdayaan pemerintahan daerah juga lebih diintensifkan, sehingga percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi, dengan mengedepankan dialog dan memberi seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan masih adanya konflik kekerasan senjata, maka kemudian operasi terpadu diperpanjang melalui Keppres No.97/2003 untuk periode 18 November 2003 - 19 Mei 2004.

Bentuk implementasi Darurat Militer di Aceh adalah penggelaran Operasi Terpadu. Operasi ini terdiri atas empat operasi yaitu: (i) Operasi Kemanusiaan, yang bertujuan melindungi keselamatan penduduk secara fisik dan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, makanan, kegiatan ibadah, dan memberikan lapangan pekerjaan secara konkret; (ii) Operasi Penegakan Hukum yang bertujuan melakukan pengintensifan penegakan hukum di Propinsi Aceh; (iii) Operasi Pemberdayaan Pemerintahan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali jalannya roda pemerintahan lokal yang tidak efektif; (iv) Operasi Pemulihan Keamanan yang bertujuan untuk memulihkan keamanan dan mereduksi kekuatan bersenjata GAM dan menggelar operasi-operasi militer.

Pelaksanaan komprehensif operasi tersebut dalam Darurat Militer I dan II dapat dikatakan cukup berhasil, walaupun berbagai kendala dan persoalan terjadi dalam kurun waktu satu tahun tersebut, yaitu: *pertama*, persoalan masih belum optimalnya profesionalitas aparat pemerintah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan ke empat operasi terpadu tersebut secara komprehensif. *Kedua*, pelaksanaan operasi penegakan hukum belum secara sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan (tanpa diskriminatif); *Ketiga*, pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban kadang kala berbenturan dengan aspek Humanitarian dan HAM.

Darurat Militer di Provinsi NAD telah berakhir dan beralih menjadi Darurat Sipil melalui Keppres No. 43 Tahun 2004. Perubahan status ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan situasi keamanan di Propinsi NAD tampak semakin baik. Penurunan status dari Darurat Militer menjadi Darurat Sipil diambil mengingat beberapa langkah kemajuan telah dicapai serta lebih menguntungkan bagi kepentingan dalam negeri termasuk dalam konteks dunia internasional. Operasi Terpadu dalam Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan dari Operasi Terpadu yang dilaksanakan pada Keadaan Darurat Militer yang lalu, yang meliputi Operasi Kemanusiaan, Operasi Pemantapan Pemerintahan, Operasi Penegakan Hukum, Operasi Pemulihan Ekonomi dan Operasi Pemulihan Keamanan dimana program dan rencana operasinya disusun dan dikeluarkan oleh masing-masing Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan operasi terpadu pada masa darurat sipil telah cukup dapat meningkatkan iklim yang kondusif bagi menjalankan roda pembangunan di Aceh. Penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan semakin baik, kendati masih ada Desa/Kelurahan yang kurang berfungsi. Sarana dan prasarana Pemerintahan Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan berangsur-angsur telah dibangun dan dilengkapi kembali. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan meningkat, hal ini ditandai dengan dibangunnya pos kamling atas inisiatif masyarakat sendiri. Tindak pidana korupsi sebanyak 53 kasus telah diproses sesuai hukum dan diantaranya sudah ada yang divonis. Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Umum (BKRU) telah berjalan sesuai rencana dengan sasaran utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan perekonomian rakyat. Pembangunan dan perbaikan kembali gedung sekolah yang dibakar GSBA-GAM telah dilakukan kurang lebih 50 % lebih. Proses belajar dan mengajar tetap berjalan, kendati masih ada yang berlangsung di bangunan sementara. Pengadaan dan penyaluran Sembako berjalan lancar baik melalui darat maupun laut. Kegiatan pasar terus meningkat, sehingga denyut kehidupan perekonomian masyarakat semakin hari semakin baik. Kegiatan operasi terpadu ini mengalami ketidakpastian dengan adanya bencana gempa bumi dan tsunami.

Pembelajaran yang dapat diambil pada masa darurat militer dan sipil ini adalah pertama, upaya penanganan Aceh secara integratif dan komprehensif akan menghasilkan keluaran yang lebih baik. Kedua, kekuatan masyarakat merupakan titik penting untuk terus dibangun demi mencapai keberhasilan pembangunan.

BAB 3

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PASCABENCANA DAN PERAN TNI – POLRI DALAM PENANGANAN DAMPAK BENCANA

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004 ternyata tidak menyurutkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa anggota masyarakat yang karena terpaksa sebagai akibat kehilangan harta benda maupun secara sengaja, telah melakukan tindak gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat sebagian besar masyarakat Aceh yang terkena bencana alam sedang prihatin. Gerakan separatis GAM juga terus melakukan berbagai serangan bersenjata kepada aparat TNI dan POLRI, serta melakukan gangguan keamanan kepada masyarakat. Sementara itu, aparat keamanan yang tengah mengalami kerugian korban jiwa dan kerusakan prasarana dan sarana, saat ini sedang sibuk melakukan operasi kemanusiaan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan masyarakat internasional. Kondisi aparat keamanan yang relatif melemah tersebut dan sedang terfokus pada kegiatan operasi kemanusiaan serta menurunnya secara drastis kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah semakin kondusif sebelum terjadinya bencana alam.

Sebagai akibat gempa bumi dan tsunami, sampai dengan tanggal 18 Februari 2005, sudah tercatat 77 personil TNI yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami, 295 personil hilang dan 42 personel mengalami luka-luka. Sedangkan Keluarga Besar TNI sebanyak 183 orang meninggal dunia, 749 orang hilang serta 43 orang luka-luka. Sementara itu, data dari Satuan Tugas Humas Polri menyebutkan bahwa dari 14.524 personil polisi yang terdiri dari 7.616 anggota polisi organik dan 6.908 personil unsur Brigade Mobil (Brimob) yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda NAD, sebanyak 242 orang anggota polisi meninggal dunia, 397 orang hilang dan 40 orang luka-luka. Korban dari aparat Pemda yang dirangkum dari Depdagri tercatat dari 7.110 orang PNS Pemprov sebanyak 608 orang aparat Pemprov meninggal dunia dan 519 orang dinyatakan hilang.

Selain korban jiwa, bencana ini menyebabkan sebagian banyak infrastruktur yang dimiliki oleh TNI, POLRI, Kejaksaan, Kominfo, Depdagri maupun Dephukham mengalami kerusakan bahkan hancur total. TNI mengalami kerusakan prasarana dan sarana, serta kehilangan dan kerusakan peralatan militer yang tersebar di NAD. Beberapa bangunan seperti gedung Mapolda, gedung Direktorat Lalu Lintas, gedung Biro Logistik, gedung Rumah Sakit Bhayangkara, gedung Bidang Logistik, gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gudang Senjata dan hanggar helikopter juga rusak dengan tingkat kerusakan 60 persen. Bangunan lain seperti gedung Direktorat Polisi Perairan, gedung Satuan Brimob, gedung Direktorat Samapta, dua gedung Mapolres dan 22 gedung Mapolsek bahkan dinyatakan rusak total. Rekapitulasi kerugian infrastruktur hasil assesment instansi di bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. **(Detail lihat Lampiran I)**

Tabel 3.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Prasarana Bidang K3M

NO.	URAIAN	JUMLAH
TOTAL DAMAGE AND LOST		Rp 1,108,359,562,288
1	MENKO POLHUKAM	Rp 1,427,000,000
2	DEPARTEMEN KOMINFO	Rp 2,009,446,250
3	LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp 5,700,000,000
4	POLRI	Rp 600,438,002,820
5	TNI	Rp 498,785,113,218

Meskipun mengalami kerugian berupa korban jiwa, serta kerusakan prasarana dan sarana, dalam keadaan tanggap darurat tidak bisa dipungkiri bahwa TNI dan Polri menjadi tulang punggung evakuasi korban, bantuan transportasi udara, darat, dan laut, pembukaan isolasi, pembangunan prasarana darurat, dan dukungan keamanan. Pasukan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU melaksanakan kegiatan *emergency rescue* di berbagai lokasi bencana. Bersama-sama dengan 530 orang dari organik Kodam yang melaksanakan evakuasi jenazah, pembersihan kota dan pembuatan jalan dan jembatan di Banda Aceh, sebanyak 1.398 orang dari Yonif 122, Yonarhanud 11 dan Yon Gabungan yang terdiri dari 40 orang posko SSY 1 SSK dari Yonif 126, 1 SSK Yonkav 6, 1 SSK Yonarmed 2 1 SST Yon Zipur 1 melaksanakan evakuasi jenazah dan pembersihan di Banda Aceh. Sementara 400 orang dari Yon Zikon 11 melaksanakan pembuatan jalan di Meulaboh. Sebanyak 400 orang dari Yon Zikon 13 melaksanakan pembuatan jalan dan jembatan di Banda Aceh. Selain itu, sebanyak 118 orang dari tim Keslapditkesad melaksanakan pembuatan rumah sakit lapangan di Meulaboh, Teunom, Calang dan Lamno. Sedangkan sebanyak 60 orang dari Yon Zikon melaksanakan pembuatan jembatan di Tapak Tuan. Sebanyak 114 orang dari Ditbengangad, Perbekud dan Demolisi Zipur melaksanakan pembuatan jalan dan jembatan di Leupung. Disamping itu, sebanyak 1500 orang dari TNI AL melaksanakan evakuasi jenazah, jalan dan jembatan di Calang. Sementara itu, sebanyak 247 orang dari TNI AU melaksanakan kegiatan operasional bandara. Selanjutnya, sebanyak 611 orang dari Akademi TNI melaksanakan pembersihan dan evakuasi jenazah di Banda Aceh, antara lain sekolah SD, SMP, SMA dan Madrasah serta pembersihan di sekitar Rumah Sakit Zaenal Abidin, Masjid Raya, kantor-kantor, Bank dan lain-lain. Mabes TNI juga melaksanakan kegiatan pendistribusian logistik ke berbagai tempat dengan mengerahkan 95 orang personil.

Sampai dengan 27 Januari 2005, sebanyak 102.897 jenazah korban bencana alam dan gelombang tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah berhasil dievakuasi dan dimakamkan oleh anggota TNI dan Polri serta relawan. Sampai saat ini pun anggota TNI dan Polri maupun relawan masih terus melakukan evakuasi dan pemakaman jenazah, meski terdapat beberapa hambatan, seperti genangan air, lumpur, sampah serta kondisi mayat yang sudah rusak.

Jembatan udara yang disediakan oleh TNI AU secara langsung maupun sebagai koordinator penerbangan pesawat negara sahabat menjadi tulang punggung utama dalam masalah kecepatan dan pembukaan isolasi total (**lihat Lampiran II - A**). Berbagai bantuan

barang yang berasal terutama dari berbagai komponen bangsa Indonesia telah diangkut ke Banda Aceh untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berhak.

Sebanyak 30 kapal perang TNI Angkatan Laut (KRI) dikerahkan untuk memperlancar bantuan yang ditujukan bagi masyarakat korban gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara sebulan lalu. Kapal-tersebut mengangkut alat berat, pasukan TNI, makanan, obat-obatan, pakaian, tenda darurat, para relawan, dan juga membawa keluar pengungsi. Selain itu, untuk mendukung operasi kemanusiaan TNI AL juga mengerahkan 10 unit pesawat udara yakni pesawat Nomad tiga unit, helikopter tiga unit, dan pesawat Cassa empat unit. **(lihat Lampiran II - B)**

Disamping melakukan operasi kemanusiaan, TNI dan Polri tetap melakukan fungsinya melakukan operasi pemulihan keamanan. Hal ini dikarenakan pada paska tsunami ini masih terjadi pula gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang memperburuk kondisi di Aceh dan mempersulit upaya penanganan dan pemulihan dampak bencana. Dalam keadaan bencana alam seperti ini, gangguan keamanan yang relatif masih sering terjadi adalah pemerasan, penghadangan bantuan logistik, penculikan, penembakan dan pembunuhan tokoh masyarakat. Selain itu, GAM juga nampaknya tidak berupaya untuk menyurutkan aksi konflik terhadap pemerintah. Sejak tanggal 26 Desember 2004 hingga 19 Februari 2005 terjadi 165 kali kontak senjata antara TNI dan GAM bahkan GAM tetap melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sebanyak 13 kali. Berdasarkan realita kondisi keamanan saat ini, meski saat ini masih dalam tahap tanggap darurat paska bencana, pemerintah tetap memberlakukan status darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara lebih rinci gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi setelah bencana gempa bumi dan tsunami adalah : pada tanggal 1 Januari 2005 GAM menghadang tim bantuan kemanusiaan di Desa Julok dan tim medis di Desa Malahayati; tanggal 4 Januari melakukan pemerasan terhadap koordinator pengungsi di Desa Nune Tutong; tanggal 5 Januari mendekati kamp pengungsi di desa Cot Karifaton namun 2 GAM berhasil dilumpuhkan aparat keamanan; tanggal 9 Januari melakukan penembakan terhadap pasukan TNI yang tengah melaksanakan karya bhakti di kampung Janggut Sengku. Kemudian di hari yang sama, GAM melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMPN 4 Tanjung Ara, melakukan penculikan terhadap Keuchik Desa Matang yang hingga kini belum diketemukan, melakukan penghadangan terhadap bantuan logistik yang akan dikirim ke Desa Matang Puding, serta satu anggota GAM melakukan peyelinapan diantara pengungsi di Desa Gampang Baru tetapi berhasil ditangkap oleh aparat keamanan.

Sedangkan tindakan kejahatan yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga masyarakat, terjadi pada tanggal 14 Januari 2005 ketika kelompok GAM dari pasukan Muzakir Manaf melakukan penembakan terhadap mantan Keuchik Ilyas (60) dan seorang guru honorer Sibran (30) di Desa Alue Dua yang tewas seketika akibat luka tembak di kepala, dada serta paha. Sementara itu, pada 17 Januari 2005, GAM melakukan penculikan terhadap 6 orang warga masyarakat, masing-masing 4 orang warga dari desa Lawe Malun yang dibebaskan dengan tebusan uang dan 2 orang lainnya warga Desa Malaka yang belum diketahui nasibnya sampai dengan saat sekarang. Peta trend perkembangan situasi keamanan terakhir di NAD dapat dilihat pada **Lampiran III**.

Sementara itu, petugas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang diperkuat oleh petugas dari Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) sampai dengan akhir januari juga telah berhasil menangkap 61 tersangka penjarahan dengan 18 jenis kasus di

Banda Aceh pascabencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi 26 Desember 2004. Tersangka itu ditangkap secara terpisah di 26 lokasi di Banda Aceh dalam berbagai kasus tindak pidana penjarahan.

BAB 4
TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Keamanan, Ketertiban dan Rekonsiliasi terdiri dari 4 tahapan yaitu :

1. Penyusunan Konsep Awal Rencana
2. Penjaringan Aspirasi dan Harapan masyarakat melalui konsultasi publik
3. Koordinasi penyusunan rencana
4. Sinkronisasi instrumen-instrumen pelaksanaan rencana terutama waktu, lokasi, sumber pendanaan, dan lembaga pelaksana

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Penyusunan Program Kerja Pokja K3M	s.d 22 Feb	Tema : Membangun Ketahanan Masyarakat dengan Kepercayaan dan Kebersamaan
2	Pembahasan Kerangka Metodologi pelaksanaan program dengan LIPI	28-Feb	Disepakati menggunakan Pendekatan partisipatif (<i>Social participatory approach</i>)
3	Diskusi dengan Pokja K3M NAD	28-Feb	Masukan tentang kondisi lapangan dan sinkronisasi kegiatan
4	Diskusi dengan Narasumber Tokoh Masyarakat NAD	1 Maret	Pengayaan tentang latar belakang budaya Masyarakat Aceh dan perlunya penyelesaian konflik dengan pendekatan nilai lokal
5	Pertemuan Koordinasi Pokja K3M (meliputi Depdagri, Kominfo, Polhukam, TNI, POLRI dan Sekretariat)	4 Maret	Membahas 3 agenda : (a) presentasi LIPI ttg metodologi; (b) pembahasan rencana program; (c) persiapan kegiatan penjaringan aspirasi di Banda Aceh
6	Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	8 Maret	Subtansi yang disampaikan narasumber sejalan dengan Pokja K3M, yakni Membangun Ketahanan Masyarakat dengan Kepercayaan dan kebersamaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
7	Penyempurnaan Program Kerja Pokja K3M	9 - 10 Maret	Memasukan aspirasi dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Program Kerja K3M
8	Konsinyasi	11 - 13 Maret 2005	Melakukan Penyelesaian Akhir dengan Pokja K3M NAD secara antar Pokja

BAB 5

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Dalam membangun kembali NAD dan Nias -Propinsi Sumatra Utara- paska bencana alam, pemerintah pusat hendaknya memperhatikan tata nilai, norma-norma, kebutuhan dan keinginan (*values, needs, interests*) masyarakat setempat yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan. Di samping itu hal lain yang perlu mendapat perhatian pula adalah latar belakang sejarah yang tidak pernah dijajah dan kehidupan masyarakat yang penuh konflik.

V.1 Empat Tatanan Nilai Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan Masyarakat

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di NAD harus dapat memperkuat sistem nilai dan norma, yakni :

1. Nilai-nilai ke-Aceh-an: agar masyarakat Aceh dengan sistem nilainya merasa dihargai dan diakui;
2. Nilai ke-Islam-an: karena mayoritas masyarakat Aceh memeluk Islam dan juga dengan adanya otonomi khusus maka sistem dan nilai-nilai syariah Islam dapat diakomodasi dalam upaya membangun kembali Aceh; (Nilai Keumatan)
3. Nilai-nilai ke-Indonesia-an: agar masyarakat Aceh harus merasakan menjadi bagian dari warga Indonesia; (Nilai : KeTuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan dan Keadilan)
4. Nilai-nilai Universalisme/nilai-nilai kemanusiaan: agar masyarakat Aceh harus merasa dirinya merupakan bagian dari warga dunia dan mempunyai tanggung jawab serta hak untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan persaudaraan antar warga dunia.

Sementara itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di Nias - Sumatra Utara-, juga bertujuan untuk memperkuat sistem nilai dan norma yaitu:

1. Nilai budaya dan adat istiadat Nias
2. Nilai-nilai ke-Indonesia-an agar masyarakat Nias merasakan menjadi bagian dari warga Indonesia; (Nilai: KeTuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan dan Keadilan)
3. Nilai-nilai Universalisme/nilai-nilai kemanusiaan: agar masyarakat Nias harus merasa dirinya merupakan bagian dari warga dunia dan mempunyai tanggung jawab serta hak untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan persaudaraan antar warga dunia.

V. 2. Kebijakan Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan

1. Membangun masyarakat melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik baik tata kehidupannya maupun kelembagaan dan mekanismenya dalam kerangka demokrasi;
2. Membangun masyarakat melalui penciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat.

V.3. Strategi Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan

Strategi membangun kembali Aceh¹⁾ dan Nias harus diletakkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik yang hancur akibat gempa dan tsunami. Pembangunan kembali Aceh harus ditempatkan dalam konteks mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh dengan cara yang damai dan bermartabat.

Saat ini, khususnya NAD merupakan daerah konflik yang sedang ditimpa bencana alam maha dahsyat yang menelan ribuan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian harta benda yang sangat besar. Momentum bencana alam ini harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk membangun kebersamaan dan kepercayaan seluruh Masyarakat Aceh membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka dalam perdamaian. Adapun strategi yang ditempuh adalah melalui Ketahanan Masyarakat dan Penciptaan Keamanan dan Ketertiban.

Adapun strategi membangun kebersamaan dan kepercayaan akan difokuskan pada:

V.3.1 Strategi Keamanan dan Ketertiban

- a. Melaksanakan refungsionalisasi lembaga–lembaga keamanan dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian,
- c. Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif;
- d. Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan
- e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

V.3.2 Strategi Ketahanan Masyarakat

- a. Fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan;
- b. Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;
- c. Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural;

¹ Sehubungan dengan penanganan dampak bencana alam dan dalam rangka membangun kembali Aceh dan Sumut, Presiden RI telah mengeluarkan 12 langkah prioritas di NAD, yaitu : (1) Mengevakuasi korban dengan segera dan intensif; (2) Melaksanakan pengelolaan pengungsi; (3) Survivor (pencarian orang hilang) dan pengumpulan jenazah; (4) Membuka dan menghidupkan jalur logistik; (5) Memulihkan jaringan komunikasi antar daerah dan kota; (6) Melakukan pembersihan kota; (7) Transparansi dan akuntabilitas bantuan baik dalam maupun luar negeri; (8) Penggunaan dana pemerintah untuk penanggulangan bencana dengan tepat (9) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (10) Perkuat kekuatan TNI dan POLRI untuk tugas bhakti maupun Operasi Pemulihan Keamanan; (11) Melibatkan LSM, baik dari PMI, ICRC dan LSM lain dalam penanggulangan bencana; dan (12) Pengendalian situasi, penanggulangan harus dilakukan dengan baik.

- d. Membangun karakter dan kebangsaan (*nation and character building*) yang mandiri dan berkualitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan saling percaya dalam membangun kembali wilayahnya dan membela negara dan bangsa;
- e. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan;
- f. Memantapkan otonomi khusus Propinsi Nangroe Aceh sehingga masyarakat Aceh mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan melanjutkan upaya-upaya pemantapan rasa cinta tanah air; dan
- g. Mengembangkan *insentive framework* yang menyeluruh untuk para dalam rangka mencapai perdamaian yang abadi dan tuntas.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan tersebut, dalam konteks kerangka waktu **strategi jangka pendek** (tahap rehabilitasi) diarahkan pada upaya membangun fondasi kebersamaan dan kepercayaan di kalangan masyarakat pada umumnya. Kepercayaan dan kebersamaan dari masyarakat memegang peranan penting bagi masa depan wilayahnya dalam wadah NKRI. Pengelolaan dampak bencana yang tepat, cepat dan tetap memperhatikan tatanan nilai, keinginan dan kepentingan masyarakat Aceh dan Nias diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut yang telah sejak lama mengalami kekecewaan berat kepada pemerintah pusat yang terakumulasi dan multidimensional.

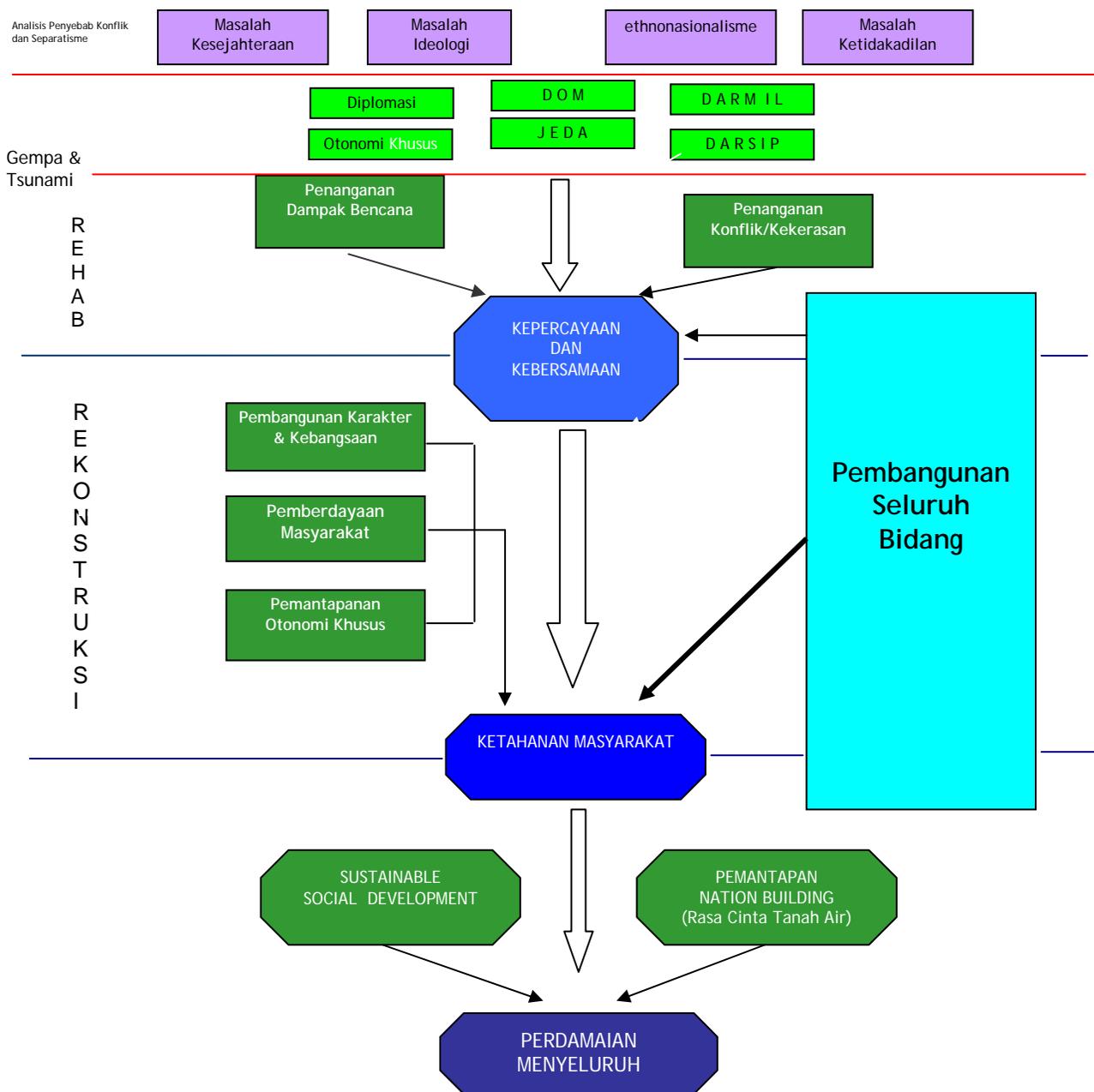
Dalam strategi jangka pendek ini, peran TNI dan POLRI akan masih signifikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kemanusiaan dan kegiatan pembangunan lainnya, mengingat kedua lembaga ini memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk penanganan daerah-daerah yang paling parah terkena bencana dan cukup terisolasi, disamping melakukan fungsi pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan **strategi jangka menengah** (tahap rekonstruksi sampai dengan tahun 2009) diarahkan pada upaya memantapkan kepercayaan dan kebersamaan Masyarakat Aceh sehingga terbangun suatu ketahanan masyarakat yang akan menjadi fondasi bagi terwujudnya PERDAMAIAN yang menyeluruh tanpa tekanan di bumi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga dapat terwujud masyarakat Aceh yang maju, adil, aman dan sejahtera. Sedangkan untuk Nias dalam jangka panjang diharapkan pula dapat terwujud masyarakat Nias yang maju, adil, aman, damai dan sejahtera.

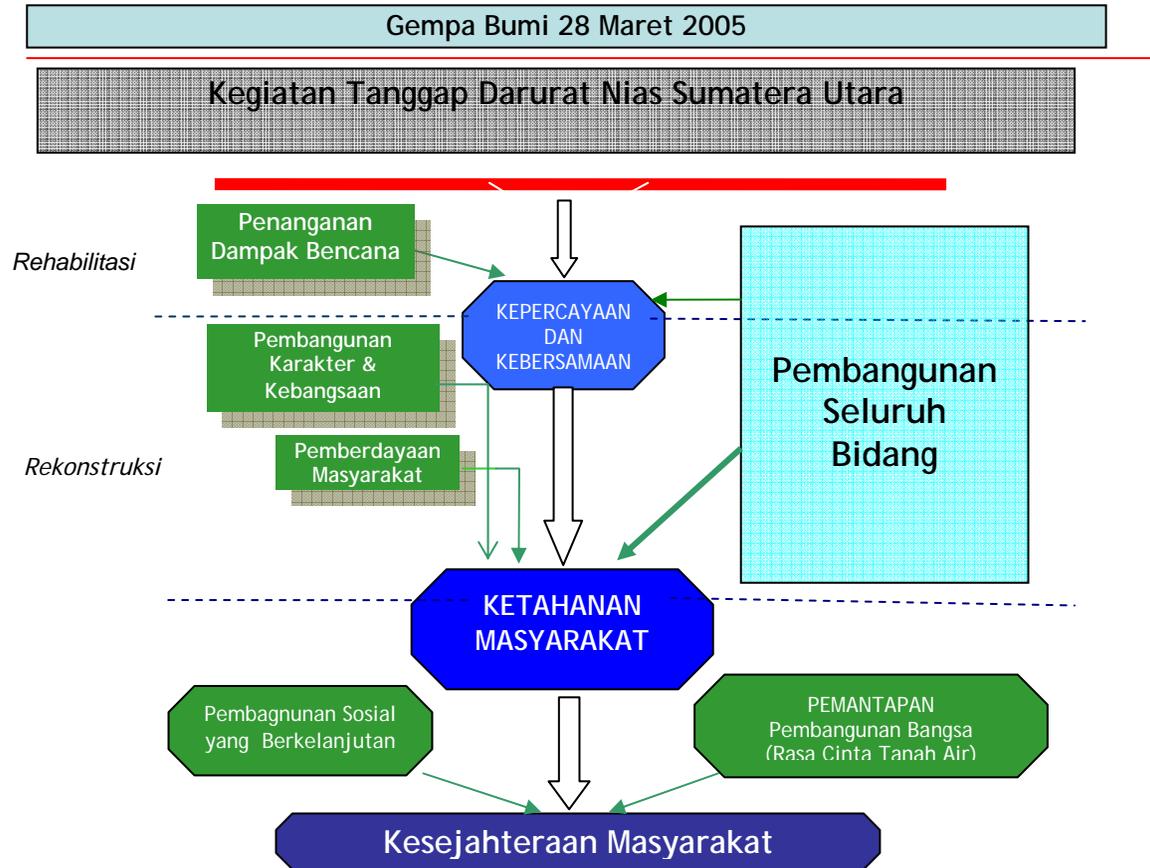
Keberhasilan untuk meningkatkan kebersamaan dan kepercayaan Masyarakat akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana dan pembangunan pada sektor-sektor lainnya yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan hankam.

Secara lengkap strategi tersebut akan diwujudkan melalui proses yang digambarkan dalam diagram berikut:

ROAD MAP PERDAMAIAN DI NAD



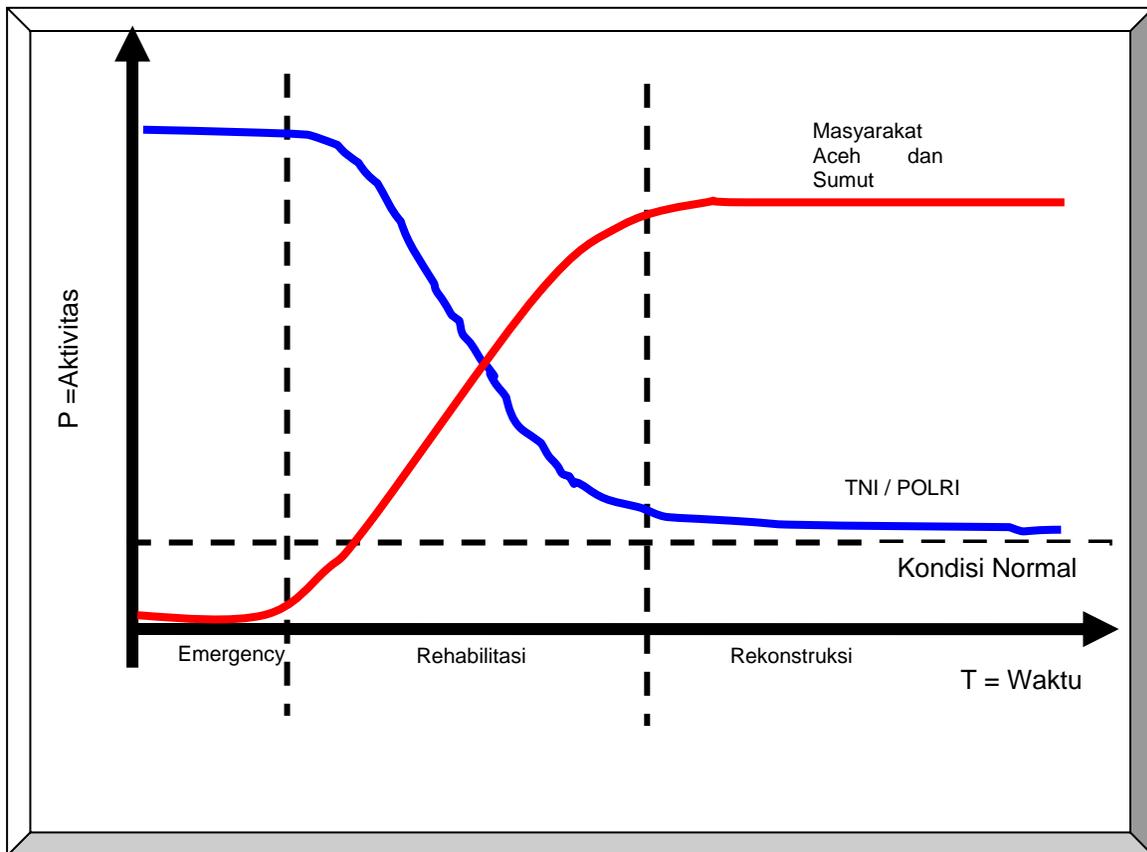
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DI NIAS SUMATRA UTARA



Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pokja K3M

BIDANG	SASARAN		
	REHABILITASI	REKONSTRUKSI	PASCA REKONSTRUKSI
BIDANG LAIN	PERBAIKAN	PEMULIHAN	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN REKONSILIASI	KEBERSAMAAN DAN KEPERCAYAAN	KETAHANAN MASYARAKAT	PERDAMAIAN MENYELURUH

Grafik Peran Masyarakat dan TNI/POLRI pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Nangroe Aceh Darussalam.



BAB 6

RENCANA PROGRAM

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumut dalam Bidang Keamanan, Ketertiban dan Rekonsiliasi dibagi ke dalam 2 Program Utama, yaitu :

1. Penciptaan Rasa Aman Masyarakat
2. Pengembangan Ketahanan Masyarakat

VI.1 Penciptaan Rasa Aman Masyarakat

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004 menyebabkan 'keguncangan' terhadap kondisi sosial masyarakat di NAD. Kondisi keamanan yang pada masa darurat sipil telah membaik, kembali mengalami kemunduran. Dalam kondisi masyarakat normal saja, 'rasa aman' masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu program penciptaan rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penciptaan rasa keamanan pada tingkat paling minimal, menjadi sebuah prasyarat penting bagi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh paska tsunami.

Untuk melaksanakan penciptaan rasa aman masyarakat akan dititik beratkan pada dua aspek :

1. **Penguatan kelembagaan**, bencana tsunami menyebabkan lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban mengalami keguncangan sehingga tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan mendasar -penciptakan rasa aman- yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban seperti kondisi sebelum tsunami. Upaya ini ditempuh melalui refungsionalisasi lembaga-lembaga bidang K3M dengan cara mengembalikan kondisi lembaga-lembaga tersebut terutama kondisi sarana, prasarana dan peralatannya seperti sebelum tsunami sehingga memungkinkan untuk menjalankan fungsinya melayani kebutuhan akan rasa aman dari masyarakat.
2. **Pengembangan masyarakat**, penciptaan rasa keamanan yang hakiki harus melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tantangan bidang keamanan dan ketertiban di masa datang yang lebih bersifat maya (*virtual*) dan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Upaya ini ditempuh bukan dengan cara melakukan *milisi-sasi masyarakat* tetapi dengan strategi persuasif melalui pendidikan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam membangun suatu masyarakat yang tertib dan menghargai perbedaan. Pentingnya aspek pengembangan masyarakat dalam penciptaan rasa aman merupakan bagian dari aras pemberdayaan masyarakat sipil dalam bela negara.

Program penciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dilakukan dalam kegiatan : (i) melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian, (ii) memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif, (iii) melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi, dan (iv) meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dikelompokkan ke dalam 3 sub program yaitu :

(a) Refungsionalisasi Kelembagaan; (b) Dukungan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (c) Keamanan dan Ketertiban Daerah.

a. Refungsionalisasi Kelembagaan

Gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2005 telah menyebabkan banyaknya sarana, prasarana dan peralatan dari lembaga-lembaga pemerintah di bidang K3M mengalami kerusakan, hancur atau hilang. Kondisi ini menyebabkan fungsi lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak optimal. Sementara di sisi lain gangguan keamanan oleh pihak GSBA - GAM tetap terjadi. Oleh karena itu, refungsionalisasi kelembagaan di bidang K3M menjadi prioritas utama dari program penciptaan rasa aman masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Refungsionalisasi Kelembagaan ini adalah membangun kembali sarana dan prasarana bidang K3M seperti kondisi sebelum bencana gempa dan tsunami serta mengadakan peralatan-peralatan bidang K3M seperti peralatan komunikasi, persenjataan maupun peralatan kesehatan seperti kondisi sebelum bencana gempa dan tsunami.

Dalam refungsionalisasi kelembagaan beberapa upaya yang perlu mendapat perhatian, yakni antara lain :

1. Tetap melakukan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan operasi pemulihan keamanan selama program refungsionalisasi berjalan.
2. Mengedepankan kebersamaan TNI/POLRI dengan rakyat dalam melakukan refungsionalisasi kelembagaan sehingga terbangun citra lembaga keamanan dan ketertiban yang berpihak kepada rakyat.
3. Mendahulukan refungsionalisasi kelembagaan di daerah-daerah yang paling parah mengalami dampak bencana seperti Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Banda Aceh, Sabang dan Simeulue.

Program / Kegiatan :

Kegiatan pada Program Refungsionalisasi kelembagaan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan fungsi lembaga-lembaga keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat seperti kondisi sebelum bencana alam dan tsunami. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam kegiatan seperti berikut :

1. Rehabilitasi Bidang Fasilitas & Konstruksi
2. Rehabilitasi Bidang Bekal Umum
3. Rehabilitasi Bidang Alpal
4. Rehabilitasi Bidang Kesehatan
5. Rehabilitasi Bidang Alkom

b. Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pada saat tanggap darurat, TNI dan POLRI merupakan institusi yang menjadi tulang punggung penanganan bencana. Memasuki tahap rehabilitasi peranan TNI dan POLRI akan digantikan oleh institusi lain dan lembaga sosial masyarakat. Diharapkan pada tahap rekonstruksi peran TNI dan POLRI kembali kepada fungsinya dalam kondisi normal, sebagai tulang punggung pertahanan, keamanan dan ketertiban daerah.

Walau demikian dukungan TNI dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD masih diperlukan, khususnya mobilisasi sumber daya manusia dan peralatannya dalam penanggulangan dampak bencana seperti dalam kegiatan : (i) membuka daerah-daerah terisolasi; (ii) melakukan pembersihan kota dan desa dari puing-puing; (iii) mendirikan rumah sakit lapangan di daerah-daerah bencana yang terisolasi maupun (iv) membantu tenaga-tenaga pengajar dan medis di kamp-kamp pengungsian.

Dalam dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD beberapa upaya yang perlu mendapat perhatian, yakni antara lain :

1. TNI dan POLRI dalam dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi akan mengedepankan operasi kemanusiaan dengan menempatkan sebagian besar dari pasukan dalam program dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya operasi kemanusiaan (*humanitarian aids*), seperti program TMMD (TNI Membangun Masuk Desa), Program Meunasah Polri, dan sebagainya; sementara sisa pasukan tetap disiagakan untuk menjaga keamanan.
2. TNI dan POLRI hanya akan mengambil inisiatif pada tahap-tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi dan akan menyerahkan kembali kepada institusi sipil dan masyarakat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tahap selanjutnya. Sedangkan TNI dan POLRI selanjutnya akan kembali dalam fungsi menjaga keamanan dan ketertiban.

Program / Kegiatan :

1. Program Pembukaan daerah-daerah terisolasi

Pembukaan daerah-daerah terisolasi dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, para relawan dan masyarakat Aceh sendiri. Pembukaan daerah-daerah terisolasi ini merupakan salah satu prioritas dalam operasi kemanusiaan dikarenakan pembukaan daerah terisolasi akan mempercepat normalisasi keadaan.

2. Program pembersihan kota/desa

Pembersihan kota/desa dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, para relawan dan masyarakat Aceh sendiri. Pembersihan kota/desa ini dari jenazah-jenazah korban maupun dari puing-puing bangunan dilakukan untuk menghidupkan kembali kota/desa yang terkena dampak bencana.

3. Program Pengadaan Rumah Sakit Lapangan

Pengadaan Rumah Sakit Lapangan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat bidang kesehatan di pengungsian. Optimasi rumah sakit lapangan ini dikarenakan dapat mobil dari satu tempat pengungsian ke tempat pengungsian lainnya bila dirasakan di lokasi awalnya fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup memadai.

4. Program Bantuan Pelayanan Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan

Pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan memang menjadi tanggung jawab dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan, akan tetapi TNI dan POLRI sebagai institusi yang personil-personilnya tersebar di seluruh NAD akan mendukung pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di daerah-daerah pengungsian termasuk pemulihan pemerintahan.

c. Keamanan Dan Ketertiban Daerah

Pasca Bencana Alam dan tsunami kondisi keamanan dan ketertiban NAD mengalami penurunan. Pada Tahapan Awal diperlukan dukungan pasukan dari luar daerah NAD untuk ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban di NAD. Sejalan dengan program refungsionalisasi kelembagaan maka pada tahun ketiga diharapkan penjagaan keamanan dan ketertiban daerah dapat dijalankan oleh aparat lokal/pasukan organik.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004 ternyata tidak menyurutkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa anggota masyarakat yang karena terpaksa sebagai akibat kehilangan harta benda maupun secara sengaja, telah melakukan tindak gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat sebagian besar masyarakat Aceh yang terkena bencana alam sedang prihatin. Gerakan separatis GAM juga terus melakukan berbagai serangan bersenjata kepada aparat TNI dan POLRI, serta melakukan gangguan keamanan kepada masyarakat. Sementara itu, aparat keamanan yang tengah mengalami kerugian korban jiwa dan kerusakan prasarana dan sarana, saat ini sedang sibuk melakukan operasi kemanusiaan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan masyarakat internasional. Kondisi aparat keamanan yang relatif melemah tersebut dan sedang terfokus pada kegiatan operasi kemanusiaan serta menurunnya secara drastis kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah semakin kondusif sebelum terjadinya bencana alam.

Dalam program keamanan dan ketertiban daerah beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian, yakni antara lain :

1. TNI dan POLRI tetap akan melakukan operasi pemulihan keamanan lebih kepada pola pengembangan defensif.
2. Disamping itu dicarikan alternatif-alternatif pemberdayaan potensi keamanan masyarakat.
3. Bertindak tegas dalam penegakan hukum.

Program/Kegiatan:

1. Mobilisasi Pasukan TNI
2. Mobilisasi Pasukan Polri

Kegiatan point 1 dan point 2 di atas diperlukan untuk mengganti personel yang menjadi korban serta penambahan personel sebagai dukungan pelaksanaan operasi kemanusiaan. Dukungan personel ini akan ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti : (i) Pengamanan Kamp Pengungsian; (ii) Pengamanan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; maupun (iii) Operasi Kemanusiaan seperti Operasi TMMD (TNI Membangun Masuk Desa) atau Operasi Meunasah POLRI.

3. Pemberdayaan Potensi Keamanan

Sejalan dengan strategi persuasif yang dikembangkan maka perlu dilaksanakan upaya-upaya untuk memberdayakan potensi keamanan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Aceh dalam mengatasi masalah-masalah keamanan lewat tindakan-tindakan yang damai dan bermartabat.

VI.2 Pengembangan Ketahanan Masyarakat

Mencermati pengertiannya, ketahanan masyarakat sebenarnya merupakan kondisi dinamis suatu masyarakat yang mengandung keuletan dan ketangguhan, yakni suatu kemampuan mengembangkan kekuatan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan masyarakatnya.

Secara implisit, pengertian tersebut di atas memberikan gambaran adanya pengakuan bahwa ketahanan masyarakat secara strategis berperan sebagai satu sistem penangkal kekuatan lain yang membahayakan masyarakat dan bangsanya. Sistem penangkal ini ditujukan untuk meniadakan keinginan pihak lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan apapun akibatnya, seperti kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ketidakmoralan, infiltrasi, serangan fisik, pendudukan, sabotase, subversi dan sebagainya. Bahkan 'penggarapan' terhadap generasi muda melalui disinformasi lewat media massa dengan tujuan menghancurkan moral juga merupakan bentuk tindakan yang merugikan. Dengan demikian sistem penangkal ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap suatu spektrum tantangan dari yang paling besar hingga yang paling kecil.

Apabila tantangan yang dihadapi lebih bersifat maya (*virtual*) maka sistem penangkal juga harus bersifat maya. Di sinilah relevansi dari ketahanan masyarakat masa kini dan masa datang. Tidaklah mengherankan apabila di bidang strategi pada saat ini dikembangkan pula pemikiran yang berorientasi pada kemitraan, seperti *participative security* atau *defence partnership* yang pada hakekatnya ditujukan pada suatu pengaturan yang memiliki derajat keuletan yang dapat diandalkan.

Untuk melaksanakan pembangunan ketahanan masyarakat akan dititik beratkan pada dua aspek :

1. **Pengembangan masyarakat** yang ditopang oleh semakin berkembangnya dan kuatnya peran masyarakat sipil untuk menjaga agar perkembangan masyarakat dan pergeserannya tidak menyimpang dari moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini ditempuh dalam rangka menumbuhkan keteladanan di dalam masyarakat dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya kesadaran berbangsa dan bernegara, serta semangat patriotisme; menjaga kelancaran komunikasi timbal balik antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah; menumbuhkan kemantapan kewaspadaan di kalangan masyarakat terhadap ketidak-adilan, kesewenang-wenangan, kezaliman, infiltrasi, subversi, penyusupan, propaganda dan pemecah belah bangsa; menumbuhkan keberanian

masyarakat melaksanakan kontrol sosial dan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

2. **Penguatan kelembagaan** untuk menciptakan dan menjamin kelancaran pembangunan dan pemantapan serta peningkatan ketahanan masyarakat. Upaya ini ditempuh melalui restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemerintahan; menyempurnakan dan memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;

Metode yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan membangun ketahanan masyarakat ini adalah melalui pendekatan partisipatif (*social participatory approach*) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan, terutama yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Program dan Kegiatan Ketahanan Masyarakat

1. Dialog Antar Komponen Masyarakat

- A. Forum Dialog Tatap Muka dengan Berbagai Komponen Masyarakat

Forum dialog tatap muka ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di Jakarta dan di provinsi NAD dan Nias (bila memungkinkan) untuk memberikan informasi sekaligus mendapatkan masukan tentang berbagai program kerja yang sudah dan perlu dilaksanakan dalam menangani bencana alam di Aceh dan Sumut.

- B. Dialog Interaktif di Media TV dan Radio

Dialog interaktif ini dilaksanakan di media televisi dan radio secara berkala dengan mengundang berbagai narasumber dan pejabat pemerintahan terkait untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan secara langsung tentang berbagai program kerja yang sudah dan perlu dilaksanakan dalam menangani bencana alam di Aceh dan Sumut.

2. Kerjasama dengan Pers dan Media

- A. Kerjasama dengan Pers Lokal Aceh dan Sumut

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang positif antara pemerintah dan pers (terutama media pers lokal dan media baru/internet di Aceh dan Sumut) sehingga dapat terbentuk situasi dan kondisi yang kondusif di Aceh dan Sumut dalam membangun kembali masyarakat Aceh dan Sumut yang baru tertimpa bencana.

- B. Penyiapan SDM, Kelembagaan dan Pengembangan Media Center

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sebuah pusat penanganan komunikasi dan informasi (*media center*), terutama dalam hal-hal mendasar bagi masyarakat Aceh dan Sumut (dalam hal kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan) di Provinsi NAD sehingga memudahkan masyarakat Aceh dan Sumut mendapatkan informasi yang *up to date* dan berkualitas. Jika dimungkinkan perlu dipertimbangkan pengembangan *mobile media centre*.

- C. Penyiapan SDM, Kelembagaan dan Pembangunan Stasiun Radio AM dan FM di Banda Aceh

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi masyarakat (terutama di Aceh) terhadap informasi yang dibutuhkan sehingga dalam tingkatan tertentu dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat secara mandiri (dibantu oleh kerjasama radio dengan radio Ibu Kota atau kota lainnya – program *sister radios*).

- D. Publikasi Program Kerja Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumut

Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat umum baik melalui media cetak maupun media elektronik (buku, poster, iklan layanan masyarakat dll) tentang berbagai kegiatan-kegiatan pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Sumut serta kondisi yang sekarang ada disana. Dalam pelaksanaannya perlu melibatkan Meunasah/Surau, dan upaya penyediaan televisi umum.

3. Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional

- A. Pelembagaan Jaringan Komunikasi Sosial Tradisional melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Aceh dan Sumut melalui jaringan komunikasi sosial tradisional melalui KIM-KIM yang ada dalam bentuk kelompok-kelompok tabligh di meunasah (salah satunya);

- B. Pelembagaan dan Pemberdayaan "Information Field Workers di setiap Kecamatan di Aceh

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas komunikasi sosial politik sekaligus efektivitas umpan balik dari masyarakat Aceh tentang program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan dan yang diharapkan oleh masyarakat setempat;

- C. Fasilitasi Pemberdayaan Media Komunitas

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong swadaya masyarakat dalam memberdayakan dirinya dalam segala bidang melalui komunikasi via media komunitas (pers/terbitan lokal, radio lokal dll), baik yang ada sekarang maupun yang akan dikembangkan di Aceh dan Sumut sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan harga diri masyarakat Aceh dan Sumut dalam membangun dirinya;

4. Advokasi dan Dialog Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi dan Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI

- A. Advokasi melalui Iklan Layanan Masyarakat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai demokratis dan meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di media pers lokal maupun media-media cetak lainnya, media elektronik lainnya (televisi dan radio lokal) serta melalui berbagai bentuk media cetak (poster, brosur, buku, leaflet, dll) yang diserahkan secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat yang ada;

B. Pemanfaatan Jaringan Kesenian Tradisional

Kegiatan ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan wawasan kebangsaan melalui berbagai bentuk kesenian tradisional (tari-tarian, sandiwara/drama, nyanyian dll) yang sudah hidup berabad-abad dalam budaya masyarakat Aceh dan Nias sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas komunikasi sosial politik melalui tatap muka dengan cara dan media yang sudah dikenal masyarakat setempat.

C. Dialog tentang Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan dan Pembangunan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan pembangunan wawasan kebangsaan melalui berbagai bentuk komunikasi tatap muka berupa sarasehan dan seminar, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi NAD secara berkelanjutan dalam 3 tahun (tahun 2005 s/d 2007). Pelaksanaanya perlu pula mempertimbangkan pelibatan mantan relawan lokal sebagaimana legitimasi yang telah mereka miliki.

D. Penguatan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayahnya

Kegiatan ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan wujud konkret langsung di dalam masyarakat. Wujud konkret tersebut dilakukan melalui: Pemantapan kembali Sistem Keamanan Lingkungan, Organisasi Ketahanan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

5. Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Forum Kemasyarakatan

- A. Bimbingan Teknis Dan Replikasi Cinta Tanah Air Dan Bhakti Pertiwi
- B. Revitalisasi Wawasan Kebangsaan
- C. Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan
- D. Sosialisasi Bidang Politik Dan Keamanan
- E. Pemantauan Situasi Perkembangan Politik Masyarakat
- F. Pemantapan Semangat Bela Negara

6. Pengembangan Peran Diplomasi

- A. Pemantapan Diplomasi Kemanusiaan
- B. Peningkatan Diplomasi Bencana (Kerjasama Negara-Negara Tertimpa Tsunami)

7. Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat

A. Pendataan Ulang Masalah Kependudukan di NAD

Saat ini penyaluran bantuan dirasakan belum adil dan tepat sasaran. Kondisi ini disebabkan tidak adanya data kependudukan yang mencerminkan kondisi kependudukan paska tsunami. Pendataan ulang masalah kependudukan sangat diperlukan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD. Sangat dimungkinkan Aceh dijadikan daerah percontohan dalam penerapan *Single Identity Number*.

B. Perumusan Kerangka Insentif (Incentive Framework) Yang Adil Bagi Semua Pihak.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun suatu kerangka insentif sebagai landasan advokasi kepada semua pihak termasuk masyarakat Aceh, anggota TNI dan POLRI maupun mantan GAM untuk bersama-sama membangun Aceh.

C. Pembuatan Sistem Peringatan Dini Konflik

Dalam menjaga keberlangsungan ketahanan masyarakat Aceh, perlu dibangun suatu mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien sehingga dapat terlihat hasil-hasil yang dicapai serta merumuskan sistem deteksi (peringatan) dini dan umpan balik dari masyarakat.

BAB 7
INDIKASI PEMBIAYAAN PROGRAM BIDANG K3M

No	Program	Indikasi Pembiayaan	
1	Refungsionalisasi Kelembagaan	Rp	1,175,788,346,000,-
2.	Dukungan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Rp	371,391,565,000,-
3.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah	Rp	176,779,000,000,-
4	Pengembangan Ketahanan Masyarakat	Rp	472,050,000,000,-
	TOTAL	Rp	2,196,008,911,000-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN
NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

RENCANA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

LAMPIRAN I
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

DETAIL PENILAIAN
KERUSAKAN DAN
KERUGIAN PRASARANA
BIDANG K3M

BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sarana, Prasarana dan Peralatan Bidang K3M

NO.	URAIAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL DAMAGE AND LOST						Rp 1,108,359,562,288
MENKO POLHUKAM		Banda Aceh				Rp 1,427,000,000
1	Kendaraan Operasional		3	unit	Rp 250,000,000	Rp 750,000,000
2	Handphone Satelite		2	unit	Rp 10,000,000	Rp 20,000,000
3	Laptop		2	unit	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000
4	Handycam		2	unit	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000
5	Projector		1	unit	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
6	Mesin Foto copy		1	unit	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000
7	Scanner		1	unit	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
8	Faximile		2	unit	Rp 3,000,000	Rp 6,000,000
9	Televisi 29"		1	unit	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
10	Televisi 21"		3	unit	Rp 3,000,000	Rp 9,000,000
11	Lemari Es		2	unit	Rp 4,000,000	Rp 8,000,000
12	AC Split 2 PK		5	unit	Rp 6,000,000	Rp 30,000,000
13	AC Split 3/4 PK		1	unit	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
14	Parabola (Drive+Receiver)		1	set	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
15	Spring Bed		4	unit	Rp 5,000,000	Rp 20,000,000
16	Kursi Ukir		2	set	Rp 4,000,000	Rp 8,000,000
17	Sofa		1	set	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
18	Meja dan Kursi Rapat		20	set	Rp 10,000,000	Rp 200,000,000
19	Meja Kerja		3	set	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000
20	Meja Komputer		2	unit	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
21	Personal Computer		2	unit	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000
22	Kursi Taman		1	unit	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
23	Meja Televisi		4	unit	Rp 1,000,000	Rp 4,000,000
24	Sound System Player		1	set	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
25	Lemari Kecil		3	unit	Rp 2,000,000	Rp 6,000,000
26	Lemari Besar		1	unit	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
27	Rak Sepatu Kayu		2	unit	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
28	Lemari Arsip		1	unit	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
29	Mesin Diesel		1	unit	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
30	Tempat Tidur Sedang		4	unit	Rp 3,000,000	Rp 12,000,000
31	Meja dan Kursi Makan		1	set	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
32	Peralatan Memasak		1	set	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
33	Peralatan Makan		1	set	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
34	Dispenser		1	unit	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
35	Tempat Tidur Kecil		1	unit	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
DEPARTEMEN KOMINFO						Rp 2,009,446,250
1	Mesin listrik otomatis		1	unit	Rp 298,800,000	Rp 298,800,000
2	Transpotable genset		1	unit	Rp 55,500,000	Rp 55,500,000
3	Portable genset		8	unit	Rp 1,290,000	Rp 10,320,000
4	Sedan		1	unit	Rp 160,000,000	Rp 160,000,000
5	Mobil unit		1	unit	Rp 17,900,000	Rp 17,900,000
6	Mobil unit		1	unit	Rp 54,704,000	Rp 54,704,000
7	Mobil unit Visual Mini		1	unit	Rp 208,500,000	Rp 208,500,000
8	Sepeda motor		3	unit	Rp 17,604,000	Rp 52,812,000
9	Mesin ketik manual		2	unit	Rp 264,500	Rp 529,000
10	Mesin ketik manual		1	unit	Rp 266,000	Rp 266,000
11	Filling besi/metal		4	unit	Rp 145,000	Rp 580,000
12	sda		1	unit	Rp 235,000	Rp 235,000
13	sda		1	unit	Rp 1,040,000	Rp 1,040,000
14	sda		3	unit	Rp 1,800,000	Rp 5,400,000
15	Lemari kaca		1	unit	Rp 400,000	Rp 400,000
16	sda		6	unit	Rp 5,000,000	Rp 30,000,000
17	OHP		1	unit	Rp 13,500,000	Rp 13,500,000
18	sda		1	unit	Rp 7,850,000	Rp 7,850,000
19	sda		1	unit	Rp 8,700,000	Rp 8,700,000
20	sda		1	unit	Rp 57,000,000	Rp 57,000,000
21	sda		1	unit	Rp 75,800,000	Rp 75,800,000
22	Lemari kayu		3	unit	Rp 175,000	Rp 525,000

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sarana, Prasarana dan Peralatan Bidang K3M

NO.	URAIAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
23	sda		1	unit	Rp 1,980,000	Rp 1,980,000
24	sda		2	unit	Rp 412,500	Rp 825,000
25	sda		2	unit	Rp 700,000	Rp 1,400,000
26	Lemari kayu tempahan		4	unit	Rp 2,950,000	Rp 11,800,000
27	sda		4	unit	Rp 4,950,000	Rp 19,800,000
28	Kursi kayu		19	unit	Rp 47,350	Rp 899,650
29	sda		40	unit	Rp 34,000	Rp 1,360,000
30	Zice		1	unit	Rp 325,000	Rp 325,000
31	sda		1	unit	Rp 900,000	Rp 900,000
32	sda		4	unit	Rp 1,500,000	Rp 6,000,000
33	Meja rapat		1	unit	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
34	Kursi putar		5	unit	Rp 75,000	Rp 375,000
35	sda		3	unit	Rp 110,000	Rp 330,000
36	sda		6	unit	Rp 700,000	Rp 4,200,000
37	sda		10	unit	Rp 950,000	Rp 9,500,000
38	sda		7	unit	Rp 725,000	Rp 5,075,000
39	sda		10	unit	Rp 500,000	Rp 5,000,000
40	Meja komputer		1	unit	Rp 350,000	Rp 350,000
41	sda		5	unit	Rp 450,000	Rp 2,250,000
42	Meja setengah biro		5	unit	Rp 32,000	Rp 160,000
43	sda		5	unit	Rp 37,600	Rp 188,000
44	sda		54	unit	Rp 75,000	Rp 4,050,000
45	Meja biro		3	unit	Rp 37,000	Rp 111,000
46	sda		1	unit	Rp 1,275,000	Rp 1,275,000
47	sda		1	unit	Rp 375,000	Rp 375,000
48	sda		5	unit	Rp 140,000	Rp 700,000
49	Radio		48	unit	Rp 180,000	Rp 8,640,000
50	TV		1	unit	Rp 3,995,000	Rp 3,995,000
51	sda		1	unit	Rp 33,900,000	Rp 33,900,000
52	sda		1	unit	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
53	Tape Cassette Rec.		2	unit	Rp 100,000	Rp 200,000
54	sda		1	unit	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000
55	Loudspeaker		5	unit	Rp 3,500,000	Rp 17,500,000
56	Sound system		1	unit	Rp 2,650,000	Rp 2,650,000
57	sda		1	unit	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
58	sda		1	unit	Rp 22,822,000	Rp 22,822,000
59	sda		1	unit	Rp 99,924,000	Rp 99,924,000
60	sda		2	unit	Rp 124,850,000	Rp 249,700,000
61	sda		2	unit	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000
62	Laser Disc		1	unit	Rp 8,137,000	Rp 8,137,000
63	Wireless		1	unit	Rp 1,900,000	Rp 1,900,000
64	sda		3	unit	Rp 7,800,000	Rp 23,400,000
65	Mic Komprence		21	unit	Rp 2,379,600	Rp 49,971,600
66	sda		11	unit	Rp 12,109,000	Rp 133,199,000
67	sda		16	unit	Rp 9,260,500	Rp 148,168,000
68	Dispencer		3	unit	Rp 1,500,000	Rp 4,500,000
69	Handy cam		1	unit	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000
70	sda		1	unit	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
71	Radio Cassette Rec.		1	unit	Rp 750,000	Rp 750,000
LEMBAGA SANDI NEGARA						Rp 5,700,000,000
	Peralatan Sandi		1	unit	Rp 1,800,000,000	Rp 1,800,000,000
	Kamar Sandi		1	unit	Rp 2,600,000,000	Rp 2,600,000,000
	Alat Pendukung Utama dan Alat Komunikasi		1	unit	Rp 1,300,000,000	Rp 1,300,000,000

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sarana, Prasarana dan Peralatan Bidang K3M

NO.	URAIAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
POLRI						Rp 600,438,002,820
1	MAPOLDA	Banda Aceh			52,419,283,000	52,419,283,000
2	MAPOLRES	Aceh Selatan			932,083,200	932,083,200
		Aceh Timur			1,789,171,200	1,789,171,200
		Aceh Barat			1,372,412,000	1,372,412,000
		Aceh Besar			886,014,720	886,014,720
		Pidie			2,227,089,600	2,227,089,600
		Aceh Utara			888,157,440	888,157,440
		Banda Aceh			2,134,684,800	2,134,684,800
		Sabang			1,750,602,240	1,750,602,240
		Aceh Tengah			443,007,000	443,007,000
		Aceh Tenggara			245,743,000	245,743,000
		Nias			888,157,440	888,157,440
3	MAPOLSEK	Simeulue			1,909,733,100	2,236,121,000
		Aceh Singkil			355,939,000	355,939,000
		Aceh Selatan			276,526,080	276,526,080
		Aceh Timur			143,471,520	143,471,520
		Aceh Barat			1,796,097,600	1,796,097,600
		Aceh Besar			1,939,697,280	1,939,697,280
		Pidie			1,461,652,000	1,461,652,000
		Aceh Utara			1,912,021,920	1,912,021,920
		Nagan Raya			320,932,800	320,932,800
		Aceh Jaya			1,528,776,000	1,528,776,000
		Banda Aceh			996,433,920	996,433,920
		Sabang			679,075,000	679,075,000
		Nias			2,177,580,520	2,177,580,520
4	POS POL				85,515,840	85,515,840
5	RUMDIN	Simeulue			2,051,786,880	3,160,580,800
		Aceh Singkil			505,147,000	505,147,000
		Aceh Barat			13,777,953,000	13,777,953,000
		Pidie			2,051,534,000	2,051,534,000
		Aceh Utara			20,325,945,000	20,325,945,000
		Nagan Raya			324,813,000	324,813,000
		Banda Aceh			42,287,170,000	42,287,170,000
		Sabang			5,128,479,000	5,128,479,000
		Nias			2,642,452,800	2,642,452,800
6	BARAK	Simeulue			1,516,086,000	1,397,402,500
		Aceh Barat			1,168,272,000	1,168,272,000
		Aceh Utara			340,221,600	340,221,600
		Sabang			1,117,656,000	1,117,656,000
		Nias			1,195,271,000	1,195,271,000
7	HANGGAR + SPBP	Aceh Barat			1,144,000,000	1,144,000,000
		Aceh Jaya			1,144,000,000	1,144,000,000
		Banda Aceh			1,951,863,000	1,951,863,000
8	R-2	Simeulue			1,600,000,000	1,600,000,000
		Aceh Timur			11,200,000,000	11,200,000,000
		Aceh Barat			12,000,000,000	12,000,000,000
		Aceh Utara			16,000,000,000	16,000,000,000
		Aceh Barat Daya			3,200,000,000	3,200,000,000
		Nagan Raya			6,400,000,000	6,400,000,000
		Banda Aceh			32,000,000,000	32,000,000,000
9	R-4	Simeulue			2,704,000,000	2,704,000,000
		Aceh Timur			13,520,000,000	13,520,000,000
		Aceh Barat			27,040,000,000	27,040,000,000
		Aceh Utara			27,040,000,000	27,040,000,000
		Aceh Barat Daya			6,760,000,000	6,760,000,000
		Nagan Raya			1,352,000,000	1,352,000,000
		Banda Aceh			27,040,000,000	27,040,000,000
10	R - 6	Simeulue			2,850,000,000	2,850,000,000
		Aceh Timur			5,700,000,000	5,700,000,000
		Aceh Barat			14,250,000,000	14,250,000,000
		Aceh Utara			28,500,000,000	28,500,000,000
		Aceh Barat Daya			2,850,000,000	2,850,000,000
		Nagan Raya			2,850,000,000	2,850,000,000
		Banda Aceh			71,250,000,000	71,250,000,000

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sarana, Prasarana dan Peralatan Bidang K3M

NO.	URAIAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
11	RANTIS	Banda Aceh			27,450,000,000	27,450,000,000
12	REVOLVER	Banda Aceh			1,430,000,000	1,430,000,000
13	SENPI BAHU	Simeulue			82,500,000	82,500,000
		Aceh Timur			206,250,000	206,250,000
		Aceh Barat			412,500,000	412,500,000
		Aceh Utara			2,062,500,000	2,062,500,000
		Aceh Barat Daya			41,250,000	41,250,000
		Nagan Raya			82,500,000	82,500,000
		Banda Aceh			412,500,000	412,500,000
14	ALKOM	Simeulue			2,598,200,000	2,598,200,000
		Aceh Barat			2,745,600,000	2,745,600,000
		Aceh Besar			3,157,900,000	3,157,900,000
		Pidie			5,677,500,000	5,677,500,000
		Bireun			2,763,000,000	2,763,000,000
		Aceh Jaya			2,235,800,000	2,235,800,000
		Banda Aceh			11,152,400,000	11,152,400,000
15	HELIKOPTER	Banda Aceh			18,864,346,000	18,864,346,000
16	ALAT APUNG	Banda Aceh			13,000,000,000	13,000,000,000
17	KOMPUTER + MESIN TIK	Simeulue			416,250,000	416,250,000
		Aceh Singkil			83,250,000	83,250,000
		Aceh Selatan			582,750,000	582,750,000
		Aceh Timur			416,250,000	416,250,000
		Aceh Barat			832,500,000	832,500,000
		Aceh Besar			1,165,500,000	1,165,500,000
		Pidie			666,000,000	666,000,000
		Aceh Utara			999,000,000	999,000,000
		Nagan Raya			333,000,000	333,000,000
		Aceh Jaya			416,250,000	416,250,000
		Banda Aceh			1,581,750,000	1,581,750,000
		Sabang			416,250,000	416,250,000
		Aceh Tengah			249,750,000	249,750,000
		Aceh Tenggara			249,750,000	249,750,000
TNI						Rp 498,785,113,218
I	MABES TNI					100,665,903,030
A	BIDANG BEKAL UMUM	NAD				18,418,655,160
B	BIDANG ALPAL	NAD				66,480,747,515
C	BIDANG FASKON	NAD				6,381,021,200
D	BIDANG KESEHATAN	NAD				7,087,200,000
E	BIDANG ALKOM	NAD				12,322,500,000
II	TNI AD					309,561,344,240
A	BIDANG ALPAL	NAD				59,902,000,000
B	BIDANG FASKON	NAD				177,038,044,240
C	BIDANG ALKOM	NAD				72,621,300,000
III	TNI AL					34,091,299,748
A	BIDANG BEKAL UMUM	NAD				175,533,415
B	BIDANG ALPAL	NAD				30,391,870,043
C	BIDANG FASKON	NAD				3,190,296,290
D	BIDANG ALKOM	NAD				333,600,000
IV	TNI AU					54,466,566,200
A	BIDANG ALPAL	NAD				1,200,000,000
B	BIDANG FASKON	NAD				53,116,566,200

LAMPIRAN II
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

SUPPORT LOGISTIK
TNI AU DAN TNI AL

BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

LAMPIRAN II - B
TABEL SUPPORT LOGISTIK TNI AL

update : 18 feb 05

NO	NAMA KRI	TANGGAL	WD/POSISI	JUMLAH BARANG
1	KRI SRE-386	12/1/2005	MEULABOH 050105 SIBOLGA SANDAR	Barang 2.664 dus makanan dan obat-obatan
2	KRI TBT-514	31-12-2004	CALANG 060105 PER.SIBOLGA	selesai debarkasi
3	KRI ABN-503	01-01-2005	CALANG 120105 BEACHING BELAWAN SANDAR	selesai debarkasi
4	KRI TKG-531	04-01-2005	MEULABOH 090105 LSM LEGO	selesai debarkasi
5	KRI TBO-511	05-01-2005	LOKSEUMAWE 100105 PER. TG.JABUNG	selesai debarkasi
6	KM BELAWAN	06-01-2005	BELAWAN 090105 LOKSEUMAWE SANDAR	Barang 18 karung Makanan 547 dus Personil TNI AL 6 orang Jml barang tinggal 30 %
7	KRI TSP-515	08-01-2005	MEULABOH 150105 PER. BEREUEH	Personil TNI AL 53 orang Relawan 176 orang Alat Berat 16 unit Kendaraan 5 unit Minuman 11.000 dus Pakaian 150 karung
8	KRI KMT-960	08-01-2005	MEULABOH 150105 SIBOLGA SANDAR	selesai debarkasi
9	KRI TGI-539	08-01-2005	MEULABOH SINABANG LEGO	Makanan 1.270 dus Minuman 510 dus Obat-obatan 7 dus Pakaian 511 karung Relawan 14 orang

LAMPIRAN II - B
TABEL SUPPORT LOGISTIK TNI AL

update : 18 feb 05

NO	NAMA KRI	TANGGAL	WD/POSISI	JUMLAH BARANG
10	KRI TRT-509	12-01-2005	MEULABOH PER. UJUNG RAJA	Makanan/Barang 4063 dus Obat-obatan 102 dus Avtur 100 Drum Oil 11 Drum HSD 11 Drum Senjata 6 pucuk Sparepart 3 peti Personil Marinir 7 orang Relawan 14 orang
11	KRI DPE-972	15-01-2005	MEULABOH 190105 LEGO	Relawan 50 orang Barang 1054 dus
12	KRI TTM-508	15-01-2005	LINLA MENUJU MEULABOH PER TABUYUNG	Barang 11922 dus, karung, galon Relawan 9 orang
13	KRI TSB-544	16-01-2005	LINLA MENUJU MEULABOH PER P.BANYAK	Relawan 57 orang Barang 48168 buah, unit, meter
14	KM BINTAN SEJAHTERA	19-01-2005	MEULABOH 250105	Barang 17344 type
15	KM RIMBA VIII	21-01-05	LINLA MENUJU MEULABOH PER LAKOTA	Beras 5000 ton
16	KM BATAVIA	21-01-05	LINLA MENUJU MEULABOH PER CALANG	Barang-barang
17	KRI TSR-542		WD PDK DAYUNG	Barang 4881 koli Kendaraan 3 unit
18	MV MELINA	25-01-05	MEULABOH 250105	Barang-barang 30.748 type
19	KRI TLS - 501	29-01-05	MEULABOH 070205	Barang-barang 4.369 type
20	KRI TSR-542	10/2/2005	LINLA MENUJU LHOKSEUMAWE	Barang 6.632 koli Kendaraan 3 unit
21	KRI TSK-512	11/2/2005	LINLA MENUJU MEULABOH	Barang 24.966 koli Kendaraan 15 unit Personil 15 orang Alat Berat 3 unit

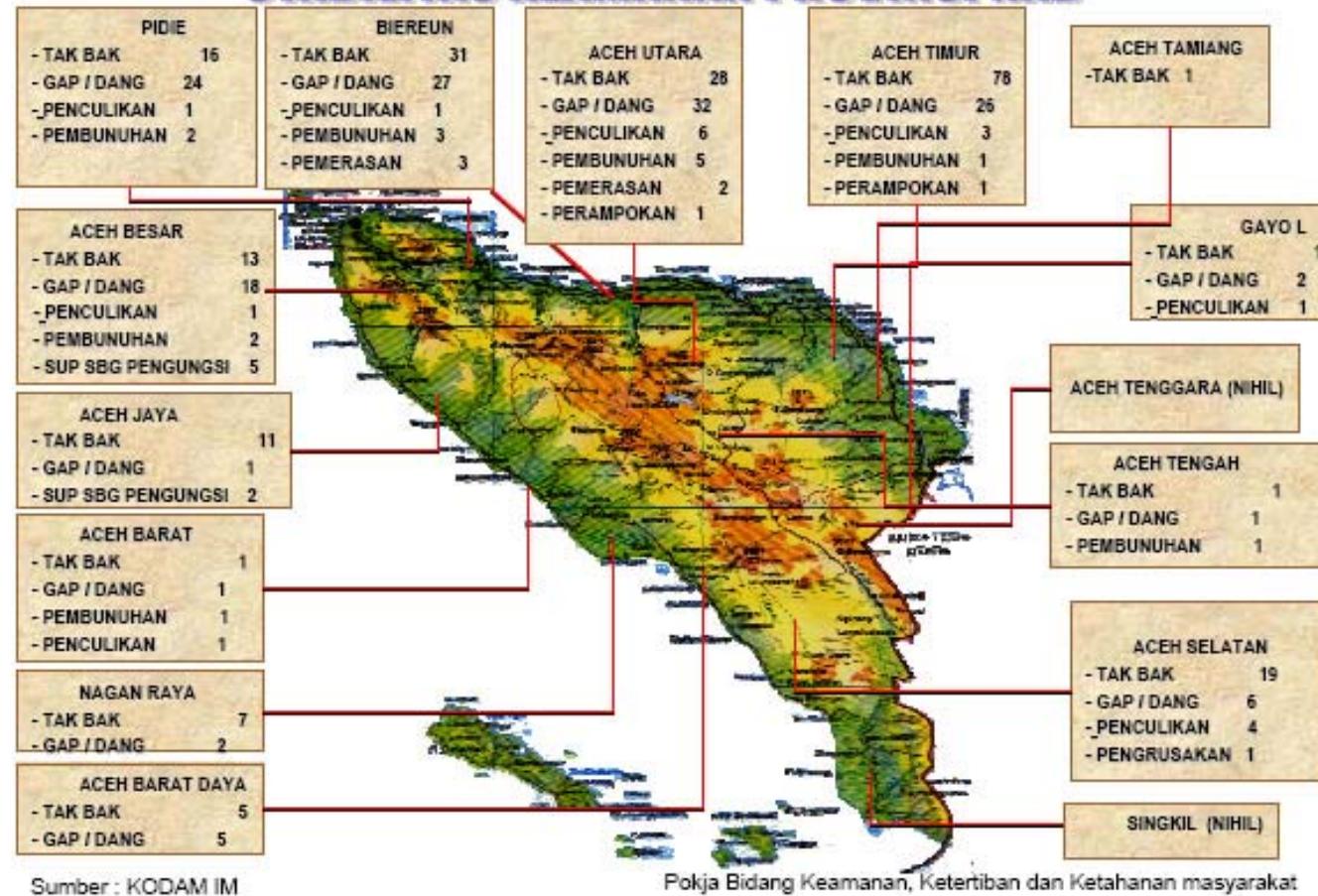
Sumber : Desk. Prov NAD

LAMPIRAN III
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

PETA TREND
SITUASI KEAMANAN NAD
PASKA TSUNAMI

BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

TREND PERKEMBANGAN SITUASI STABILITAS KEAMANAN PROVINSI NAD



**LAMPIRAN IV
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS**

**KETERKAITAN PROGRAM KERJA
BIDANG K3M
DENGAN POKJA LAINNYA**

**BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT**

Tabel Keterkaitan Program Kerja Bidang K3M Dengan Pokja Lainnya

Program/Kegiatan K3M	Jadwal Implementasi /Prequisite internal	Prequisite Bidang Lain	Pokja Terkait	Aktivitas Pokja Terkait
PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT	2005 - 2009/ Refungsionalisasi Kelembagaan			
1. Dialog Antar Komponen Masyarakat	Refungsionalisasi dinas / TV Lokal, Radio Lokal pemda.	Social Security.	Pokja Ekonomi, Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, sosial budaya.	
2. Kerjasama dengan Pers dan Media	Media lokal: TV, Radio, Majalah, Surat Kabar	Infrastruktur	Pokja Prasarana dan Sarana; Ekonomi	
3. Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional	Refungsionalisasi Kelembagaan; Dialog Masyarakat; Kerjasama Pers-Media	Social Security; Kelembagaan Masyarakat/Adat	Pokja Ekonomi; Infrastruktur; Kesehatan; Pendidikan; Kelembagaan, sosial budaya	
4. Advokasi dan Dialog Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi dan Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI	Refungsionalisasi Kelembagaan; Kerjasama Pers-Media; Dialog Masyarakat; Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional	Social Security; Kelembagaan	Pokja Ekonomi; Infrastruktur; Kesehatan; Pendidikan; Kelembagaan, sosial budaya	
5. Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Forum Kemasyarakatan	Dialog Masyarakat; Fasilitasi Jaringan Tradisional	Social Security; Kelembagaan	Pokja Ekonomi; Infrastruktur; Kesehatan; Pendidikan; Kelembagaan, sosial budaya	
6. Pengembangan Peran Diplomasi	-	Kerjasama Internasional	Pokja Kelembagaan.	
7. Pembangunan Deteksi Dini Ketahanan Masyarakat	Refungsionalisasi Kelembagaan; Dialog Masyarakat; Fasilitasi Jaringan Tradisional	Social security; Kelembagaan	Pokja Ekonomi; Infrastruktur; Kesehatan; Pendidikan; Kelembagaan, sosial budaya	

Tabel Keterkaitan Program Kerja Bidang K3M Dengan Pokja Lainnya

Program/Kegiatan K3M	Jadwal Implementasi /Prequisite internal	Prequisite Bidang Lain	Pokja Terkait	Aktivitas Pokja Terkait
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	2005 - 2007/ -			
1. Rehabilitasi Bidang Fasilitas & Konstruksi	-	Tata Ruang dan Infrastruktur	Pokja Tata Ruang; Prasarana dan Sarana	
2. Rehabilitasi Bidang Bekal Umum	-	-	-	
3. Rehabilitasi Bidang Alpal	Fasilitas dan Konstruksi	-	-	
4. Rehabilitasi Bidang Kesehatan	Fasilitas dan Konstruksi	-	-	
5. Rehabilitasi Bidang Alkom	-	-	-	

Tabel Keterkaitan Program Kerja Bidang K3M Dengan Pokja Lainnya

Program/Kegiatan K3M	Jadwal Implementasi /Prequisite internal	Prequisite Bidang Lain	Pokja Terkait	Aktivitas Pokja Terkait
DUKUNGAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	2005-2009 / Refungsionalisasi Kelembagaan			
1. Pembukaan daerah-daerah terisolasi	Refungsionalisasi Kelembagaan (Penambahan Peralatan)	-	Pokja Infrastruktur	
2. Pembersihan kota/desa	Refungsionalisasi Kelembagaan (Penambahan Peralatan)	-	Pokja Infrastruktur	
3. Pengadaan Rumah Sakit Lapangan	-	-	Kesehatan	
4. Bantuan Pelayanan Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan	-	Kesehatan; Pendidikan	

Tabel Keterkaitan Program Kerja Bidang K3M Dengan Pokja Lainnya

Program/Kegiatan K3M	Jadwal Implementasi /Prequisite internal	Prequisite Bidang Lain	Pokja Terkait	Aktivitas Pokja Terkait
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	2005-2009 (Kembali ke normal)			
1. Dukungan pelaksanaan Operasi Kemanusiaan	Rehab bidang alkom dan alpal	-	Pokja Infrastruktur; Pendidikan; Kesehatan	
2. Pengamanan Kamp Pengungsian	-	-	Pokja Infrastruktur; Pendidikan; Kesehatan	
3. Pengamanan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rehab bidang alkom dan alpal	-	Semua Pokja	
4. Pemberdayaan Potensi Keamanan	-	Social Security; Infrastruktur	Pokja Infrastruktur; Pendidikan; Kesehatan; Ekonomi	

LAMPIRAN V
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

PENJADWALAN DAN INDIKASI
PEMBIAYAAN
PROGRAM - PROGRAM
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BIDANG K3M

BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN							Rp 1,175,788,346	Rp 536,151,642	Rp 486,325,174	Rp 121,475,852	Rp 18,864,346	Rp -
I	MENKOPOLHUKAM	POLHUKAM					Rp 1,427,000	Rp 499,450	Rp 927,550	Rp -	Rp -	Rp -
A.	BANGUNAN DAN FASILITAS											
	a Fasilitas Gedung Kantor		Banda Aceh	1 paket		Rp 1.427.000	Rp 1.427.000	Rp 499.450	Rp 927.550			
II	KOMINFO	KOMINFO					Rp 35,483,589	Rp 12,419,256	Rp 23,064,333	Rp -	Rp -	Rp -
A.	BANGUNAN DAN FASILITAS											
	a Gedung Kantor Dinas		Banda Aceh	1 paket		Rp 3.910.124	Rp 3.910.124	Rp 1.368.543	Rp 2.541.581			
	b Stasiun RRI		Banda Aceh	1 paket		Rp 11.660.500	Rp 11.660.500	Rp 4.081.175	Rp 7.579.325			
	c Stasiun Tranmisi TVRI		Meulaboh, Aceh Barat	1 paket		Rp 12.115.000	Rp 12.115.000	Rp 4.240.250	Rp 7.874.750			
			Meukek, Pidie	1 paket		Rp 1.273.948	Rp 1.273.948	Rp 445.882	Rp 828.066			
			Geumpang, Aceh Utara	1 paket		Rp 1.374.736	Rp 1.374.736	Rp 481.158	Rp 893.578			
			Lokop, Aceh Timur	1 paket		Rp 1.171.786	Rp 1.171.786	Rp 410.125	Rp 761.661			
			Singkil, Singkil	1 paket		Rp 1.966.948	Rp 1.966.948	Rp 688.432	Rp 1.278.516			
			Meureudu, Pidie	1 paket		Rp 2.010.547	Rp 2.010.547	Rp 703.691	Rp 1.306.856			
III	LSN	LSN					Rp 5,700,000	Rp 2,630,000	Rp 3,070,000	Rp -	Rp -	Rp -
A.	PERALATAN SANDI											
	a Kamar Sandi		Banda Aceh	1 paket		Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp -			
	b Peralatan Sandi		Banda Aceh	1 paket		Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	Rp 830.000	Rp 1.770.000			
	c Alat Pendukung Utama dan Telekomunikasi		Banda Aceh	1 paket		Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp -	Rp 1.300.000			
IV	POLRI	POLRI					Rp 600,864,844	Rp 240,174,889	Rp 318,354,277	Rp 13,000,000	Rp 18,864,346	Rp -
A	PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN											
	a. Relokasi Personel Polda NAD						Rp 30.649.080,50	Rp 30.649.080,50				
	b. Biaya Pembuatan Renskep						Rp 2.617.156	Rp 2.617.156				
	c. Penyiapan/penggantian personel						Rp 52.275	Rp 52.275				
	d. Penggantian perlengkapan perorangan						Rp 14.624.320	Rp 14.624.320				
							Rp 13.355.330	Rp 13.355.330				
B	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA											
	Pembangunan Fasilitas						Rp 570.215.763	Rp 209.525.808	Rp 318.354.277	Rp 13.000.000	Rp 18.864.346	Rp -
	a. Penampungan sementara - 1416 KK		Banda Aceh				Rp 343.568.953	Rp 129.774.045	Rp 203.323.576			
							Rp 20.292.120	Rp 20.292.120				
	b. MAKO						Rp 98.663.478	Rp 33.459.209	Rp 62.138.532			
	Mapolda		Banda Aceh				Rp 36.838.816	Rp 12.893.586	Rp 23.945.230			
	Brimobda		Banda Aceh				Rp 26.312.000	Rp 9.209.200	Rp 17.102.800			
	Dit. Polair						Rp 10.045.000	Rp 3.515.750	Rp 6.529.250			
	Polres Banda Aceh		Banda Aceh				Rp 7.612.192	Rp 2.664.267	Rp 4.947.925			

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LANJUTAN												
REFUNGSIONALISASI POLRI												
	Polres Aceh Besar		Aceh Besar				Rp 2.380.000	Rp 833.000	Rp 1.547.000			
	Polres Aceh Barat		Aceh Barat				Rp 8.715.000	Rp 3.050.250	Rp 5.664.750			
	Polres Pidie		Pidie				Rp 1.785.000	Rp 624.750	Rp 1.160.250			
	Polres Simeulue		Simeulue				Rp 1.909.733	Rp 668.407	Rp 1.241.326			
	Polres Nias		Nias				Rp 3.065.737	Rp 1.073.008	Rp 1.992.729			
c.	Rumah Dinas						Rp 224.613.355	Rp 76.022.716	Rp 141.185.044	Rp	Rp	Rp
	Rumjab Polda						Rp 4.116.000	Rp 1.440.600	Rp 2.675.400			
	Aspol Lamteumen I						Rp 17.782.800	Rp 6.223.980	Rp 11.558.820			
	Aspol Lamteumen II						Rp 8.573.600	Rp 3.000.760	Rp 5.572.840			
	Aspol Lamjame						Rp 14.534.800	Rp 5.087.180	Rp 9.447.620			
	Aspol Ulhe Lee						Rp 1.276.800	Rp 446.880	Rp 829.920			
	Aspol Kebun Kelapa						Rp 362.880	Rp 127.008	Rp 235.872			
	Aspol Ditpolair						Rp 3.752.000	Rp 1.313.200	Rp 2.438.800			
	Aspol Brimob Lingke						Rp 127.342.320	Rp 44.569.812	Rp 82.772.508			
	Aspol Punge						Rp 6.322.400	Rp 2.212.840	Rp 4.109.560			
	Aspol Kebun Kelapa						Rp 1.464.960	Rp 512.736	Rp 952.224			
	Aspol Ulhe Lee						Rp 1.276.800	Rp 446.880	Rp 829.920			
	Aspolsek Kuta Alam						Rp 576.800	Rp 201.880	Rp 374.920			
	Aspolsek Darussalam						Rp 257.600	Rp 90.160	Rp 167.440			
	Aspolsek Krueng Raya						Rp 728.000	Rp 254.800	Rp 473.200			
	Aspolsek Peukan Bada						Rp 151.200	Rp 52.920	Rp 98.280			
	Aspolsek Pidie						Rp 13.244.000	Rp 4.635.400	Rp 8.608.600			
	Aspolsek Aceh Barat						Rp 10.696.000	Rp 3.743.600	Rp 6.952.400			
	Aspolsek Sama Tiga						Rp 576.800	Rp 201.880	Rp 374.920			
	Aspolsek Teunom						Rp 151.200	Rp 52.920	Rp 98.280			
	Aspolsek Setia Bakti						Rp 151.200	Rp 52.920	Rp 98.280			
	Aspolsek Sampoinet						Rp 1.002.400	Rp 350.840	Rp 651.560			
	Aspolsek Johan Pahlawan						Rp 576.800	Rp 201.880	Rp 374.920			
	Aspolsek Krueng Sabe						Rp 728.000	Rp 254.800	Rp 473.200			
	Aspolsek Krueng Raya						Rp 728.000	Rp 254.800	Rp 473.200			
	Aspolsek Lhoknga						Rp 408.800	Rp 143.080	Rp 265.720			
	Aspolsek Leupung						Rp 425.600	Rp 148.960	Rp 276.640			
	Aspolsek Simulue						Rp 3.567.872	Rp 1.248.752	Rp 2.319.120			
	Aspolsek Nias						Rp 3.837.723	Rp 1.343.203	Rp 2.494.520			
	Pengadaan Material						Rp 226.046.810	Rp 79.751.763	Rp 115.030.702	Rp 13.000.000	Rp 18.864.346	Rp
a.	Pengadaan Material Dasar						Rp 70.398.559	Rp 70.398.559				
b.	Peralatan Humas Polda NAD						Rp 553.700	Rp 553.700				
c.	Operasional Alat Transportasi						Rp 143.571.048	Rp 345.280	Rp 111.361.422	Rp 13.000.000	Rp 18.864.346	
d.	Alut / Alsus Serse Polda NAD						Rp 12.123.503	Rp 8.454.224	Rp 3.669.280			

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REFUNGSIONALISASI TNI							Rp 532,312,913	Rp 280,428,047.47	Rp 140,909,013.62	Rp 108,475,851.88	Rp -	Rp -
V	MABES TNI	MABES TNI					Rp 107,648,697	Rp 60,637,279	Rp 32,774,992	Rp 13,236,426	Rp -	Rp -
	A BIDANG BEKAL UMUM						Rp 17,705,056	Rp 15,617,833	Rp 87,222	Rp	Rp	Rp
	B BIDANG ALPAL						Rp 66,080,097	Rp 22,396,433	Rp 32,217,981	Rp 11,465,683	Rp	Rp
	C. BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 3,860,320	Rp 2,619,788.48	Rp 469,788	Rp 1,770,743	Rp	Rp
	D BIDANG KESEHATAN						Rp 7,680,724	Rp 7,680,724	Rp	Rp	Rp	Rp
	E BIDANG ALKOM						Rp 12,322,500	Rp 12,322,500	Rp	Rp	Rp	Rp
VI	TNI AD	TNI AD					Rp 328,102,081	Rp 186,626,057	Rp 58,536,598	Rp 81,439,426	Rp -	Rp -
	A BIDANG ALPAL						Rp 59,902,000	Rp 54,387,000	Rp 4,875,000	Rp 640,000	Rp	Rp
	B BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 203,593,751	Rp 67,632,727	Rp 53,661,598	Rp 80,799,426	Rp	Rp
	C BIDANG ALKOM						Rp 64,606,330	Rp 64,606,330	Rp	Rp	Rp	Rp
VII	TNI AL	TNI AL					Rp 34,423,501	Rp 11,779,845	Rp 22,643,655	Rp -	Rp -	Rp -
	A BIDANG BEKAL UMUM						Rp 170,747	Rp 93,433	Rp 77,313	Rp	Rp	Rp
	B BIDANG ALPAL						Rp 30,334,563	Rp 10,342,895	Rp 19,991,668	Rp	Rp	Rp
	C BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 3,668,841	Rp 1,094,167	Rp 2,574,674	Rp	Rp	Rp
VIII	TNI AU	TNI AU					Rp 62,138,635	Rp 21,384,866	Rp 26,953,769	Rp 13,800,000	Rp -	Rp -
	A BIDANG ALPAL						Rp 1,200,000	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp	Rp	Rp
	B BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 60,938,635	Rp 20,784,866	Rp 26,353,769	Rp 13,800,000	Rp	Rp

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH							Rp 176,779,000	Rp 54,875,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800
1	MOBILISASI PASUKAN TNI DARI LUAR NAD	TNI					Rp 18,700,000	Rp 18,700,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Personil						Rp 4,950,000	Rp 4,950,000				
	Peralatan						Rp 11,000,000	Rp 11,000,000				
	Alat Transportasi						Rp 2,750,000	Rp 2,750,000				
2	MOBILISASI PASUKAN POLRI DARI LUAR NAD	POLRI					Rp 127,379,000	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800
	Penugasan personil BKO Polda NAD untuk menjaga keamanan Kamp dan masa rehab&rekons						Rp 127,379,000	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800
3	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN						Rp 30,700,000	Rp 10,700,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	Pemberdayaan Potensi Keamanan	BIN					Rp 25,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	DEPHAN					Rp 5,700,000	Rp 5,700,000				

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI						Rp 371,391,565	Rp 321,013,083	Rp 42,386,495	Rp 7,991,987	Rp -	Rp -
1	PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	TNI					Rp 73,937,461	Rp 73,937,461	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Dukungan Operasional						Rp 3,389,040	Rp 3,389,040				
	Dukungan Peralatan						Rp 61,205,307	Rp 61,205,307				
	Pengadaan Ransum						Rp 9,343,114	Rp 9,343,114				
2	PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUIING	TNI					Rp 88,025,131	Rp 88,025,131	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Dukungan Operasional						Rp 8,133,696	Rp 8,133,696				
	Dukungan Peralatan						Rp 61,205,307	Rp 61,205,307				
	Pengadaan Ransum						Rp 18,686,128	Rp 18,686,128				
3	PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	TNI					Rp 114,000,000	Rp 114,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan						Rp 114,000,000	Rp 114,000,000				
4	Operasi Bhakti TNI						Rp 68,789,016	Rp 34,394,508	Rp 34,394,508	Rp -	Rp -	Rp -
	Dukungan Material	TNI					Rp 68,789,016	Rp 34,394,508	Rp 34,394,508			
5	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN						Rp 26,639,957	Rp 10,655,983	Rp 7,991,987	Rp 7,991,987	Rp -	Rp -
	Dukungan Pelayanan TNI	TNI					Rp 14,530,886	Rp 5,812,354	Rp 4,359,266	Rp 4,359,266		
	Dukungan Pelayanan Polri	POLRI					Rp 12,109,071	Rp 4,843,629	Rp 3,632,721	Rp 3,632,721		

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

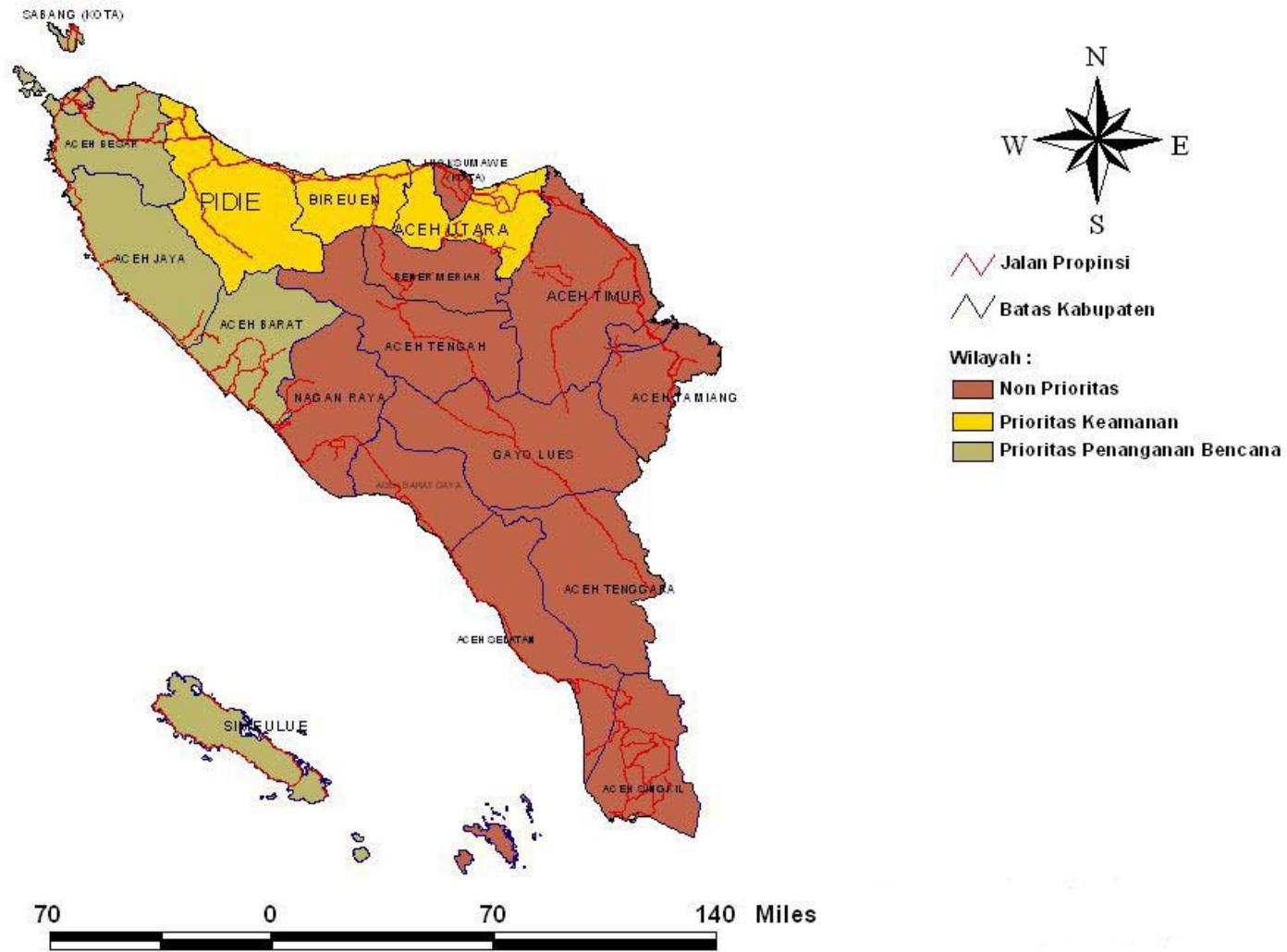
NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT							Rp 472,050,000	Rp 308,187,500	Rp 56,525,000	Rp 36,112,500	Rp 38,612,500	Rp 27,612,500
1	SUB PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	KOMINFO					Rp 38,925,000	Rp 19,562,500	Rp 10,425,000	Rp 3,012,500	Rp 3,012,500	Rp 2,912,500
a	Perencanaan dan Sosialisasi Kegiatan dan Materi Kampanye		Jakarta				Rp 500,000	Rp 500,000				
b	Dialog Antar Komponen Masyarakat		Jakarta - NAD				Rp 2.165.514	Rp 874.516	Rp 417.873	Rp 291.041	Rp 291.041	Rp 291.041
c	Kerjasama dengan Media Pers dan Penyiaran		Jakarta - NAD				Rp 10.803.061	Rp 9.483.061	Rp 528.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000
d	Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional		NAD & NIAS				Rp 17.935.570	Rp 3.290.840	Rp 8.501.724	Rp 2.047.669	Rp 2.047.669	Rp 2.047.669
e	Advokasi dan Dialog Penanaman Nilai Demokrasi		NAD & NIAS				Rp 4.487.212	Rp 3.597.212	Rp 500.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000
f	Evaluasi dan Monitoring		NAD & NIAS				Rp 3.033.644	Rp 1.816.873	Rp 477.401	Rp 279.790	Rp 279.790	Rp 179.790
2	SUB PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN		NAD & NIAS				Rp 105,000,000	Rp 27,000,000	Rp 20,600,000	Rp 21,100,000	Rp 23,600,000	Rp 12,700,000
a	Bimbingan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi	DEPDAGRI					Rp 38.000.000	Rp 13.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 10.500.000	Rp 2.500.000
b	Revitalisasi Wawasan Kebangsaan	DEPDAGRI					Rp 29.000.000	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.500.000	Rp 6.500.000	Rp 5.000.000
c	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan	DEPDAGRI					Rp 8.000.000	Rp 2.500.000	Rp 4.300.000	Rp 1.100.000	Rp 100.000	
d	Sosialisasi Bidang Polkam	DEPDAGRI					Rp 12.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 3.200.000	Rp 2.200.000	Rp 1.100.000
e	Pemantauan situasi perkembangan politik masyarakat	DEPDAGRI					Rp 6.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 1.000.000
f	Pemantapan semangat Bela Negara	DEPHAN					Rp 12.000.000		Rp 1.500.000	Rp 4.200.000	Rp 3.200.000	Rp 3.100.000
3	SUB PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT						Rp 303,125,000	Rp 249,125,000	Rp 13,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000
a	Fasilitasi Pelembagaan Forum Kemasyarakatan	DEPDAGRI	NAD & NIAS				Rp 35.000.000	Rp 5.000.000	Rp 7.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
b	Pendataan Ulang Kependudukan/Single Identity Number	DEPDAGRI	NAD				Rp 20.000.000	Rp 20.000.000				
c	Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ttg Insentive Framework	POLHUKAM	NAD				Rp 5.000.000	Rp 5.000.000				
d	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	DEPDAGRI	NAD				Rp 1.000.000	Rp 1.000.000				
e	Pembuatan Early Warning System	LIPI	NAD				Rp 3.500.000	Rp 2.500.000	Rp 1.000.000			
f	Operasionalisasi EWS	DEPDAGRI	NAD				Rp 3.000.000			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
g	Desk Aceh	POLHUKAM	NAD				Rp 235.625.000	Rp 215.625.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	SUB PROGRAM PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	DEPLU	NAD				Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp -	Rp -	Rp -
a	Pemantapan Diplomasi Kemanusiaan						Rp 12.500.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000			
b	Peningkatan Diplomasi Kebencanaan						Rp 12.500.000	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000			
TOTAL PEMBIAYAAN POKJA K3M							Rp 2,196,008,911	Rp 1,220,228,025	Rp 615,712,469	Rp 196,056,139	Rp 87,952,646	Rp 58,088,300

LAMPIRAN VI
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS

PETA KABUPATEN PRIORITAS
PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN
REKONSTRUKSI

BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT

PETA WILAYAH PRIORITAS



**LAMPIRAN VII
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS**

**PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BIDANG K3M
PER KABUPATEN**

**BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT**

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT	
	1		2		3		4		5	
POKJA K3M	Rp	2,019,790,390	Rp	71,792,731	Rp	3,218,971	Rp	-	Rp	29,168,081
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	Rp	1,016,869,824	Rp	71,792,731	Rp	3,218,971	Rp	-	Rp	29,168,081
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN NON TNI POLRI	Rp	22,697,624	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	12,115,000
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI MENKOPOLHUKAM	Rp	1,427,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi fasilitas gedung Menko Polhukam	Rp	1,427,000							
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI DEPARTEMEN KOMINFO	Rp	15,570,624	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	12,115,000
	Rehabilitasi Kantor Dinas KOMINFO Propinsi NAD	Rp	3,910,124					Stasiun Transmisi TVRI Meulaboh	Rp	12,115,000
	Rehabilitasi Stasiun RRI NAD	Rp	11,660,500							
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp	5,700,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi Kamar Sandi	Rp	1,800,000							
	Rehabilitasi Peralatan Sandi	Rp	2,600,000							
	Rehabilitasi Alat Pendukung Utama dan Telekomunikasi	Rp	1,300,000							

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SIMEULUE 6	FIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10
POKJA K3M	Rp 13,484,733	Rp 7,136,367	Rp -	Rp 1,374,736	Rp 1,966,948
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	Rp 13,484,733	Rp 7,136,367	Rp -	Rp 1,374,736	Rp 1,966,948
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN NON TNI POLRI	Rp -	Rp 3,284,495	Rp -	Rp 1,374,736	Rp 1,966,948
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI MENKOPOLHUKAM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI DEPARTEMEN KOMINFO	Rp -	Rp 3,284,495	Rp -	Rp 1,374,736	Rp 1,966,948
		Stasiun Transmisi TVRI Mukek Rp 1,273,948		Stasiun Transmisi TVRI Geumpang Rp 1,374,736	Stasiun Transmisi TVRI Singkil Rp 1,966,948
		Stasiun Transmisi TVRI Meureude Rp 2,010,547			
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN 11	ACEH TIMUR 12	ACEH BARAT DAYA 13	ACEH TAMIANG 14	NAGAN RAYA 15
POKJA K3M	Rp -	Rp 1,171,786	Rp -	Rp -	Rp -
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	Rp -	Rp 1,171,786	Rp -	Rp -	Rp -
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN NON TNI POLRI	Rp -	Rp 1,171,786	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI MENKOPOLHUKAM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI DEPARTEMEN KOMINFO	Rp -	Rp 1,171,786	Rp -	Rp -	Rp -
		Stasiun Transmisi TVRI Lokop Rp 1,171,786			
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SABANG	LANGSA	LHOKSEMAWE	GAYO LUES	BENER MERIAH
	16	17	18	19	20
POKJA K3M	Rp 12,135,748	Rp -	Rp 2,827,684	Rp -	Rp -
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	Rp 12,135,748	Rp -	Rp 2,827,684	Rp -	Rp -
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN NON TNI POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI MENKOPOLHUKAM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI DEPARTEMEN KOMINFO	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH TENGGARA	ACEH TENGAH	NIAS	TOTAL BIAYA
	21	22	23	23
POKJA K3M	Rp -	Rp -	Rp 31,940,737	Rp 2,196,008,911
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN	Rp -	Rp -	Rp 14,640,737	Rp 1,175,788,346
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN NON TNI POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 42,610,589
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI MENKOPOLHUKAM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,427,000
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI DEPARTEMEN KOMINFO	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,483,589
REHABILITASI FASILITAS DAN KONSTRUKSI LEMBAGA SANDI NEGARA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,700,000

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLRI	Rp	575,397,182	Rp	7,612,192	Rp	2,380,000	Rp	-	Rp	8,715,000		
PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	Rp	30,649,081	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Relokasi Personel Polda NAD	Rp	2,617,156									
	Biaya Pembuatan Renskep	Rp	52,275									
	Penyiapan / penggantian personel	Rp	14,624,320									
	Penggantian perlengkapan perorangan	Rp	13,355,330									
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	Rp	318,101,291	Rp	7,612,192	Rp	2,380,000	Rp	-	Rp	8,715,000		
	Penampungan Sementara/ Barak	Rp	20,292,120	Polres Banda Aceh Rp	7,612,192	Polres Aceh Besar Rp	2,380,000				Polres Aceh Barat Rp	8,715,000
	Rehabilitasi Mapolda	Rp	36,838,816									
	Rehabilitasi Brimobda	Rp	26,312,000									
	Rehabilitasi Dit. Polair	Rp	10,045,000									
	Rehabilitasi Rumah Jabatan Polda	Rp	4,116,000									
	Rehabilitasi Asrama Polres dan Polsek	Rp	220,497,355									
PENGADAAN MATERIAL	Rp	226,646,810	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan Material Dasar	Rp	70,398,559									
	Peralatan Humas Polda NAD	Rp	553,700									
	Operasional Alat Transportasi	Rp	143,571,048									
	Alut / Alsus Serses Polda NAD	Rp	12,123,503									

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SIMEULUE		PIDIE		BIREUEN		ACEH UTARA		ACEH SINGKIL	
			6		7		8		9		10	
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLRI			Rp	1,909,733	Rp	1,785,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA			Rp	1,909,733	Rp	1,785,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
			Polres Simeulue	Rp	1,909,733	Polres Pidie	Rp	1,785,000				
PENGADAAN MATERIAL			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGADAAN MATERIAL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	SABANG	LANGSA	LHOKSEUMAWE	GAYO LUES	BENER MERIAH
	16	17	18	19	20
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGADAAN MATERIAL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	ACEH TENGGARA		ACEH TENGAH		NIAS		TOTAL BIAYA
	21		22		23		23
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLRI	Rp	-	Rp	-	Rp	3,065,737	Rp 600,864,844
PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 30,649,081
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	Rp	-	Rp	-	Rp	3,065,737	Rp 343,568,953
					Polres Nias	Rp 3,065,737	
PENGADAAN MATERIAL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 226,646,810

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN TNI	Rp	418,775,018	Rp	64,180,539	Rp	838,971	Rp	-	Rp	-	Rp	8,338,081	
REHABILITASI BIDANG BEKAL UMUM TNI	Rp	17,705,056	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum MABES TNI	Pengadaan Bekum Mabes TNI	Rp	17,705,056	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum TNI AL		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
REHABILITASI BIDANG ALPAL TNI	Rp	147,516,660	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Rehabilitasi Bidang Alpal MABES TNI		Rp	62,080,097	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan Alpal Darat	Rp	35,184,902										
	Pengadaan Alpal Laut	Rp	12,440,370										
	Pengadaan Senum dan Alkapjat	Rp	8,736,695										
	Pengadaan Alpalsus	Rp	5,718,130										
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AD		Rp	53,902,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan Alpal Darat	Rp	43,975,000										
	Pengadaan Alpal Laut	Rp	1,700,000										
	Pengadaan Senum dan Alkapjat	Rp	1,862,000										
	Pengadaan Alpalsus	Rp	6,365,000										

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SIMEULUE		PIDIE		BIREUEN		ACEH UTARA		ACEH SINGKIL	
	6	7	8	9	10							
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN TNI	Rp	11,575,000	Rp	2,066,872	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
REHABILITASI BIDANG BEKAL UMUM TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum MABES TNI			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum TNI AL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
REHABILITASI BIDANG ALPAL TNI	Rp	5,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
Rehabilitasi Bidang Alpal MABES TNI	Rp	2,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
	Rp	2,000,000										
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AD	Rp	3,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI BIDANG BEKAL UMUM TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI BIDANG ALPAL TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Alpal MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SABANG		LANGSA		LHOKSEUMAWE		GAYO LUES		BENER MERIAH	
	16	17	18	19	20							
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN TNI	Rp	12,135,748	Rp	-	Rp	2,827,684	Rp	-	Rp	-	Rp	-
REHABILITASI BIDANG BEKAL UMUM TNI	Rp	170,747	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum MABES TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum TNI AL	Rp	170,747	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Bidang Bekum BMP LANAL Sabang	Rp	93,433										
Pengadaan Bidang Bekum Lain-lain LANAL Sabang	Rp	49,453										
Pengadaan Bidang Bekum FASHARKAN Sabang	Rp	27,860										
REHABILITASI BIDANG ALPAL TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alpal MABES TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AD	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA			TOTAL BIAYA
	ACEH TENGGARA	ACEH TENGAH	NIAS	
	21	22	23	23
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN TNI	Rp -	Rp -	Rp 11,575,000	Rp 532,312,913
REHABILITASI BIDANG BEKAL UMUM TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17,875,802
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum MABES TNI	Rp -	Rp -		Rp 17,705,056
Rehabilitasi Bidang Bekal Umum TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 170,747
REHABILITASI BIDANG ALPAL TNI	Rp -	Rp -	Rp 5,000,000	Rp 157,516,660
Rehabilitasi Bidang Alpal MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000 Rp 2,000,000	Rp 66,080,097
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AD	Rp -	Rp -	Rp 3,000,000	Rp 59,902,000

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AL	Rp	30,334,563	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Pengadaan Alpal Darat	Rp	24,171,429											
Pengadaan Alpal Laut	Rp	1,318,720											
Pengadaan Senyum dan Alkapjat	Rp	1,305,375											
Pengadaan Alpal sus	Rp	3,539,040											
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AU	Rp	1,200,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Pengadaan Alpal sus	Rp	1,200,000											
REHABILITASI BIDANG FASILITAS DAN KONSTRUKSI TNI	Rp	188,697,621	Rp	- Rp	51,013,254	Rp	- Rp	838,971	Rp	-	Rp	3,003,192	
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi MABES TNI	Rp	-	Rp	816,858	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,325,250	
			Rehabilitasi Kantor Ditrml 1-01/Babinkum TNI	Rp	100,000						Gedung Subdenkomlekstrada	Rp	610,311
			Rehabilitasi Gedung Denkomlekstrada	Rp	610,312						Mako Satgas-12 di Meulaboh.	Rp	165,800
											Mako Yonif 100/Raider.	Rp	66,320
											Mako Yonzipur-9/Kostrad.	Rp	66,320
											mako Yonif-623.	Rp	66,320
											Mako Yonif-521	Rp	66,320
											Gudang Satgas Banmin Meulaboh.	Rp	111,000
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AD	Rp	188,122,621	Rp	-	Rp	-	Rp	838,971	Rp	-	Rp	1,677,942	
Bangunan dan fasilitas milik TNI AD di seluruh NAD	Rp	136,320,740					Tanah untuk asrama untuk 5 KORAMIL di KODIM 0101	Rp	729,540		Tanah Asrama utk 10 Koramil Kodim 0105	Rp	1,459,080
Prasarana milik TNI AD di seluruh NAD	Rp	27,264,148											

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SIMEULUE		PIDIE		BIREUEN		ACEH UTARA		ACEH SINGKIL	
	6		7		8		9		10			
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AU	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
REHABILITASI BIDANG FASILITAS DAN KONSTRUKSI TNI	Rp	6,325,000	Rp	1,528,322	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi MABES TNI	Rp	575,000	Rp	74,106	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
			Kout Saggaspur-3 Pidie	Rp	64,440							
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AD	Rp	5,750,000	Rp	1,454,216	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rp	5,000,000	Rp	1,264,536								

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI BIDANG FASILITAS DAN KONSTRUKSI TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SABANG		LANGSA		LHOKSEUMAWE		GAYO LUES		BENER MERIAH	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AU	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
REHABILITASI BIDANG FASILITAS DAN KONSTRUKSI TNI	Rp	11,965,002	Rp	-	Rp	2,365,184	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi MABES TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	494,107	Rp	268,758	Rp	-	Rp	-
							Gedung Denkomlestrada	Rp	32,180			
							Mako Satgas Muara	Rp	64,360			
							Mako Satgas Muara, Yon 2 Mar	Rp	64,360			
							Mako Satgas Muara, Yon 3 Mar	Rp	64,360			
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AD	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA			TOTAL BIAYA	
	ACEH TENGGARA	ACEH TENGAH	NIAS	23	
	21	22	23		
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	30,334,563
Rehabilitasi Bidang Alpal TNI AU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	1,200,000
REHABILITASI BIDANG FASILITAS DAN KONSTRUKSI TNI	Rp -	Rp -	Rp 6,325,000	Rp	272,061,547
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp 575,000	Rp	3,860,320
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AD	Rp -	Rp -	Rp 5,750,000	Rp	203,593,751
			Rp 5,000,000		

TABEL KEGIATAN PORJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT	
	1		2		3		4		5	
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AU	Rp	575,000	Rp	50,196,396	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan BangMat Alatri	Rp 500,000	Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda	Rp 2,230,000						
			Taxiway Light & Apron Light Lanud IM	Rp 1,419,040						
			Perbaikan Bandara Cut Nyak Dien	Rp 40,000,000						
REHABILITASI BIDANG KESEHATAN TNI	Rp	-	Rp	844,785	Rp	-	Rp	-	Rp	5,334,889
Rehabilitasi Bidang Kesehatan Mabes TNI			Pengadaan Fasilitas Kesehatan di RS. TK III Banda Aceh	Rp 844,785					Pengadaan Fasilitas Kesehatan di RS. TK IV Meulaboh	Rp 5,334,889
REHABILITASI BIDANG ALKOM TNI	Rp	64,855,680	Rp	12,322,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alkom MABES TNI	Rp	12,322,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi Siskomsat KOREM 012	Rp 2,000,000								
	Rehabilitasi Siskomsat Subden Komplekstrada	Rp 5,000,000								
	Rehabilitasi Siskomsat Satgas Komlek Opsliahkam	Rp 5,322,500								
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AD	Rp	64,606,330	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan Alkom	Rp 33,195,000								
	Pengadaan Alkom Saluran	Rp 5,818,830								
	Pengadaan Alkom Permika	Rp 21,500,000								
	Pengadaan Alat Foto Film	Rp 187,500								

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SIMEULUE		PIDIE		BIREUEN		ACEH UTARA		ACEH SINGKIL	
			6		7		8		9		10	
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AL			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AU			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
REHABILITASI BIDANG KESEHATAN TNI			Rp	250,000	Rp	538,550	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Kesehatan Mabes TNI			Rp	250,000	Pengadaan Fasilitas Kesehatan di Polban Sigi Rp	538,550						
REHABILITASI BIDANG ALKOM TNI			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alkom MABES TNI			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AD			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
REHABILITASI BIDANG KESEHATAN TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Kesehatan Mabes TNI					
REHABILITASI BIDANG ALKOM TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Alkom MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		SABANG		LANGSA		LHOKSEUMAWE		GAYO LUES		BENER MERIAH	
	16	17	18	19	20							
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AL	Rp	3,606,827	Rp	-	Rp	62,014	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi LANAL Sabang	Rp	1,344,568			Rehabilitasi LANAL Lhokseumawe	Rp	53,925				
	Rehabilitasi FASHARKAN Sabang	Rp	1,791,803									
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AU	Rp	8,358,175	Rp	-	Rp	1,809,064	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rehabilitasi Lanud Maimun Saleh	Rp	1,468,706			Rehabilitasi Satrad 204	Rp	1,573,099				
	Rehabilitasi Satrad 209	Rp	5,799,273									
REHABILITASI BIDANG KESEHATAN TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	462,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Kesehatan Mabes TNI						Pengadaan Fasilitas Kesehatan di RS. TK Lhokseumawe	Rp	462,500				
REHABILITASI BIDANG ALKOM TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alkom MABES TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AD	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA			TOTAL BIAYA
	ACEH TENGGARA	ACEH TENGAH	NIAS	
	21	22	23	23
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,668,841
Rehabilitasi Bidang Fasilitas dan Konstruksi TNI AU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60,938,635
REHABILITASI BIDANG KESEHATAN TNI	Rp -	Rp -	Rp 250,000	Rp 7,680,724
Rehabilitasi Bidang Kesehatan Mabes TNI			Rp 250,000	
REHABILITASI BIDANG ALKOM TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 77,178,180
Rehabilitasi Bidang Alkom MABES TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12,322,500
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 64,606,330

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		BANDA ACEH	ACEH BESAR	ACEH JAYA	ACEH BARAT
	1	2	3	4	5	
	Pengadaan Alat Bengkel/Pendukung	Rp 3,905,000				

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SIMEULUE 6	PIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN 11	ACEH TIMUR 12	ACEH BARAT DAYA 13	ACEH TAMIANG 14	NAGAN RAYA 15

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SABANG 16	LANGSA 17	LHOKSEUMAWE 18	GAYO LUES 19	BENER MERIAH 20

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH TENGGARA 21	ACEH TENGAH 22	NIAS 23	TOTAL BIAYA 23

TABEL KEGIATAN PORJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH	ACEH BESAR	ACEH JAYA	ACEH BARAT
	1		2	3	4	5
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AL	Rp	249,350	Rp	-	Rp	-
Rehabilitasi Alkom	Rp	249,350				
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	Rp	176,779,000	Rp	-	Rp	-
MOBILISASI PASUKAN TNI	Rp	18,700,000	Rp	-	Rp	-
Mobilisasi Pasukan TNI dari Luar NAD	Rp	18,700,000				
MOBILISASI PASUKAN POLRI	Rp	127,379,000	Rp	-	Rp	-
Mobilisasi Pasukan POLRI dari Luar NAD	Rp	127,379,000				
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp	30,700,000	Rp	-	Rp	-
Pemberdayaan Potensi Keamanan BIN	Rp	25,000,000				
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara DEPHAN	Rp	5,700,000				

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	SIMEULUE 6	PIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MOBILISASI PASUKAN TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MOBILISASI PASUKAN POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MOBILISASI PASUKAN TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp - Rp -
MOBILISASI PASUKAN POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp - Rp -
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp - Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	SABANG	LANGSA	LHOKSEUMAWE	GAYO LUES	BENER MERIAH
	16	17	18	19	20
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AL	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MOBILISASI PASUKAN TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MOBILISASI PASUKAN POLRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	ACEH TENGGARA		ACEH TENGAH		NIAS		TOTAL BIAYA
	21		22		23		23
Rehabilitasi Bidang Alkom TNI AL	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 249,350
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 176,779,000
MOBILISASI PASUKAN TNI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 18,700,000
MOBILISASI PASUKAN POLRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 127,379,000
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 30,700,000

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp	371,391,565	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	Rp	73,937,461	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Dukungan Operasional	Rp	3,389,040									
	Dukungan Peralatan	Rp	61,205,307									
	Pengadaan Ransum	Rp	9,343,114									
PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUIING	Rp	88,025,131	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Dukungan Operasional	Rp	8,133,696									
	Dukungan Peralatan	Rp	61,205,307									
	Pengadaan Ransum	Rp	18,686,128									
PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	Rp	114,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan	Rp	114,000,000									
Operasi Bhakti TNI	Rp	68,789,016	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Dukungan Material	Rp	68,789,016									
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rp	26,639,957	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Dukungan Pelayanan TNI	Rp	14,530,886									
	Dukungan Pelayanan POLRI	Rp	12,109,071									

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SIMEULUE 6	FIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUIING	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Operasi Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN	ACEH TIMUR	ACEH BARAT DAYA	ACEH TAMIANG	NAGAN RAYA
	11	12	13	14	15
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUIING	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Operasi Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SABANG 16	LANGSA 17	LHOKSEUMAWE 18	GAYO LUES 19	BENER MERIAH 20
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUING	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Operasi Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH TENGGARA	ACEH TENGAH	NIAS	TOTAL BIAYA
	21	22	23	23
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 371,391,565
PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 73,937,461
PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUNG	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 88,025,131
PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 114,000,000
Operasi Bhakti TNI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 68,789,016
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26,639,957

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN	ZONA		PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH		ACEH BESAR		ACEH JAYA		ACEH BARAT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT	Rp	454,750,001	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	Rp	34,625,001	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Perencanaan dan Sosialisasi Kegiatan dan Materi	Rp	500,000									
	Dialog Antar Komponen Masyarakat	Rp	2,165,514									
	Kerjasama dengan Media Pers dan Penyiaran	Rp	10,803,061									
	Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional	Rp	14,935,570									
	Advokasi dan Dialog Penanaman Nilai Demokrasi	Rp	3,687,212									
	Evaluasi dan Monitoring	Rp	2,533,644									
PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN	Rp	97,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Bintek dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi	Rp	35,000,000									
	Revitalisasi Wawasan Kebangsaan	Rp	27,000,000									
	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan	Rp	7,500,000									
	Sosialisasi Bidang Polkam	Rp	11,000,000									
	Pemantauan Situasi Perkembangan Politik Masyarakat	Rp	5,500,000									
	Pemantapan Semangat Bela Negara	Rp	11,000,000									

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	SIMEULUE 6	PIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN 11	ACEH TIMUR 12	ACEH BARAT DAYA 13	ACEH TAMIANG 14	NAGAN RAYA 15
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SABANG 16	LANGSA 17	LHOKSEUMAWE 18	GAYO LUES 19	BENER MERIAH 20
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	PROPINSI NAD / UMUM		BANDA ACEH	ACEH BESAR	ACEH JAYA	ACEH BARAT
	1		2	3	4	5
PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	Rp	298,125,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Fasilitasi Pelebagaan Forum Kemasyarakatan	Rp	30,000,000				
Pendataan Ulang Kependudukan	Rp	20,000,000				
Pembentukan TPRK dan Pembuatan detail 'insentive framework'	Rp	5,000,000				
Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	Rp	1,000,000				
Pembuatan EWS	Rp	3,500,000				
Operasionalisasi EWS	Rp	3,000,000				
Desk Aceh	Rp	235,625,000				
PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	Rp	25,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pemantapan Diplomasi Kemasyarakatan	Rp	12,500,000				
Pemantapan Diplomasi Kebencanaan	Rp	12,500,000				

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN / ZONA	SIMEULUE 6	PIDIE 7	BIREUEN 8	ACEH UTARA 9	ACEH SINGKIL 10
PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	ACEH SELATAN 11	ACEH TIMUR 12	ACEH BARAT DAYA 13	ACEH TAMIANG 14	NAGAN RAYA 15
PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

ZONA KEGIATAN	SABANG 16	LANGSA 17	LHOKSEUMAWE 18	GAYO LUES 19	BENER MERIAH 20
PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TABEL KEGIATAN POKJA BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PER KABUPATEN

KEGIATAN \ ZONA	ACEH TENGGARA		ACEH TENGAH		NIAS		TOTAL BIAYA	
	21		22		23		23	
PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	Rp	-	Rp	-	Rp	5,000,000	Rp	303,125,000
					Fasilitasi Pelebagaan Forum Kemasyarakatan	Rp 5,000,000		
PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	25,000,000

**LAMPIRAN VIII
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS**

**PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BIDANG K3M
PER KEGIATAN**

**BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT**

REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN LSN

Tahap : Rehabilitasi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Pengadaan Kamar Sandi dan Peralatan Sandi	
Sasaran	Menciptakan Rasa Aman Masyarakat	
Kelompok Sasaran	LSN	
Indikator Keberhasilan	Tersedianya kamar sandi dan peralatan sandi	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	LSN	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 5,700,000	
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN POLHUKAM

Tahap : Rehabilitasi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Rehabilitasi Prasarana Bangunan Kantor Polhukam	
Sasaran	Menciptakan Rasa Aman Masyarakat	
Kelompok Sasaran	POLHUKAM	
Indikator Keberhasilan	Tersedianya prasarana bangunan kantor POLHUKAM	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	POLHUKAM	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 1,427,000	
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Perumusan Kebijakan 'Insentive Framework'	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	Terumuskannya Kebijakan tentang 'Insentive Framework' yang komprehensif	
Jadwal Pelaksanaan	2005	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	POLHUKAM	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	5,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Desk Aceh	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	POLHUKAM	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	235,625,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Pengembangan Diplomasi Kebencanaan dan Kemanusiaan	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat Internasional	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPLU	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	25,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Pengembangan EWS	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	Tersusunnya database Early Warning Sistem tentang Ketahanan Masyarakat NAD	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	LIPI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	3,500,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Pengembangan Potensi Keamanan
Sasaran	Menciptakan Rasa Awal
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD
Indikator Keberhasilan	-
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	BIN
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 25,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Sasaran	Menciptakan Rasa Aman
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD
Indikator Keberhasilan	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pendahuluan bela negara
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	DEPHAN
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 5,700,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Pemantapan Semangat Bela Negara
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD
Indikator Keberhasilan	-
Jadwal Pelaksanaan	2007 - 2009
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	DEPHAN
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 10,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN KOMINFO

Tahap : Rehabilitasi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Sasaran	Menciptakan Rasa Aman
Kelompok Sasaran	KOMINFO
Indikator Keberhasilan	Terbangun Kembali fasilitas dan prasarana KOMINFO
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2006
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	KOMINFO
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 35,483,589
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	KOMINFO	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	38,925,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Bimbingan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	38,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	

Kegiatan	Revitalisasi Wawasan Kebangsaan	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	29,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	

Kegiatan	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	8,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	

Kegiatan	Sosialisasi Bidang Polkam	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	12,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	

Kegiatan	Pemantauan situasi perkembangan politik masyarakat	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	6,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi & Rekonstruksi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD & NIAS	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Fasilitasi Pelebagaan Forum Kemasyarakatan
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD
Indikator Keberhasilan	-
Jadwal Pelaksanaan	2005 - 2009
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	DEPDAGRI
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 35,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi	Tahun : 2005
Kawasan : NAD	Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat	
Kegiatan	Pendataan Ulang Kependudukan/Single Identity Number
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD
Indikator Keberhasilan	-
Jadwal Pelaksanaan	2005
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-
Instansi pelaksana	DEPDAGRI
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp 20,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Pejabat yang dikontak	

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rehabilitasi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	1,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT

Tahap : Rekonstruksi		Tahun : 2005
Kawasan : NAD		Zona :
Pokja : Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat		
Kegiatan	Operasionalisasi EWS	
Sasaran	Meningkatkan Daya Tangkal	
Kelompok Sasaran	Masyarakat NAD	
Indikator Keberhasilan	-	
Jadwal Pelaksanaan	2005	
Keterkaitan dengan program/kegiatan lain	-	
Instansi pelaksana	DEPDAGRI	
Perkiraan Biaya (dalam ribuan)	Rp	3,000,000
Sumber Pembiayaan	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	
Pejabat yang dikontak		

**LAMPIRAN IX
MEMBANGUN KEBERSAMAAN DAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
DAN NIAS**

**PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BIDANG K3M
PER INSTANSI**

**BIDANG KEAMANAN, KETERTIBAN DAN
KETAHANAN MASYARAKAT**

TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN							Rp 1,175,788,346	Rp 536,151,642	Rp 486,325,174	Rp 121,475,852	Rp 18,864,346	Rp -
I	MENKOPOLHUKAM	POLHUKAM					Rp 1,427,000	Rp 499,450	Rp 927,550	Rp -	Rp -	Rp -
A.	BANGUNAN DAN FASILITAS											
	a Fasilitas Gedung Kantor		Banda Aceh	1	paket	Rp 1,427,000	Rp 1,427,000	Rp 499,450	Rp 927,550			
II	KOMINFO	KOMINFO					Rp 35,483,589	Rp 12,419,256	Rp 23,064,333	Rp -	Rp -	Rp -
A.	BANGUNAN DAN FASILITAS											
	a Gedung Kantor Dinas		Banda Aceh	1	paket	Rp 3,910,124	Rp 3,910,124	Rp 1,368,543	Rp 2,541,581			
	b Stasiun RRI		Banda Aceh	1	paket	Rp 11,660,500	Rp 11,660,500	Rp 4,081,173	Rp 7,579,327			
	c Stasiun Transmisi TVRI											
			Meulaboh, Aceh Barat	1	paket	Rp 12,115,000	Rp 12,115,000	Rp 4,240,250	Rp 7,874,750			
			Meukek, Pidie	1	paket	Rp 1,273,948	Rp 1,273,948	Rp 445,883	Rp 828,066			
			Geumpang, Aceh Utara	1	paket	Rp 1,374,736	Rp 1,374,736	Rp 481,158	Rp 893,578			
			Lokop, Aceh Timur	1	paket	Rp 1,171,786	Rp 1,171,786	Rp 410,123	Rp 761,663			
			Singkil, Singkil	1	paket	Rp 1,966,948	Rp 1,966,948	Rp 688,432	Rp 1,278,516			
			Meureudu, Pidie	1	paket	Rp 2,010,547	Rp 2,010,547	Rp 703,691	Rp 1,306,856			
III	LSN	LSN					Rp 5,700,000	Rp 2,630,000	Rp 3,070,000	Rp -	Rp -	Rp -
A.	PERALATAN SANDI											
	a Kamar Sandi		Banda Aceh	1	paket	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000	Rp -			
	b Peralatan Sandi		Banda Aceh	1	paket	Rp 2,600,000	Rp 2,600,000	Rp 830,000	Rp 1,770,000			
	c Alat Pendukung Utama dan Telekomunikasi		Banda Aceh	1	paket	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000	Rp -	Rp 1,300,000			
IV	POLRI	POLRI					Rp 606,864,844	Rp 240,174,888	Rp 318,354,277	Rp 13,000,000	Rp 18,864,346	Rp -
A.	PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN											
	a Relokasi Personel Polda NAD						Rp 30,649,080,50	Rp 30,649,080,50				
	b Biaya Pembuatan Renskep						Rp 2,617,154	Rp 2,617,154				
	c Penyiapan/penggantian personel						Rp 52,275	Rp 52,275				
	d Penggantian perlengkapan perorangan						Rp 14,624,328	Rp 14,624,328				
							Rp 13,355,330	Rp 13,355,330				
B.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA											
	Pembangunan Fasilitas						Rp 570,215,763	Rp 209,525,808	Rp 318,354,277	Rp 13,000,000	Rp 18,864,346	Rp -
	a Penampungan sementara - 1416 KK		Banda Aceh				Rp 343,568,953	Rp 129,774,043	Rp 203,323,576	Rp -		
							Rp 20,292,120	Rp 20,292,120				
	b MAKO						Rp 98,663,478	Rp 33,459,209	Rp 62,136,532			
	Mapolda		Banda Aceh				Rp 36,838,810	Rp 12,893,580	Rp 23,945,230			
	Brimobda		Banda Aceh				Rp 26,312,000	Rp 9,209,200	Rp 17,102,800			
	Dit. Polair						Rp 10,045,000	Rp 3,515,750	Rp 6,529,250			
	Polres Banda Aceh		Banda Aceh				Rp 7,612,192	Rp 2,664,267	Rp 4,947,925			

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LANJUTAN REFUNGSIONALISASI POLRI												
	Polres Aceh Besar		Aceh Besar				Rp 2,380,000	Rp 833,000	Rp 1,547,000			
	Polres Aceh Barat		Aceh Barat				Rp 8,715,000	Rp 3,050,250	Rp 5,664,750			
	Polres Pidie		Pidie				Rp 1,785,000	Rp 624,750	Rp 1,160,250			
	Polres Simeulue		Simeulue				Rp 1,909,733	Rp 668,407	Rp 1,241,326			
	Polres Nias		Nias				Rp 3,063,737	Rp 1,073,008	Rp 1,992,729			
c.	Rumah Dinas						Rp 224,613,355	Rp 76,022,719	Rp 141,185,044	Rp	Rp	Rp
	Rumjab Polda						Rp 4,116,000	Rp 1,440,600	Rp 2,675,400			
	Aspol Lamteumen I						Rp 17,782,800	Rp 6,223,980	Rp 11,558,820			
	Aspol Lamteumen II						Rp 8,573,600	Rp 3,000,760	Rp 5,572,840			
	Aspol Lamjame						Rp 14,534,800	Rp 5,087,180	Rp 9,447,620			
	Aspol Ulhe Lec						Rp 1,276,800	Rp 446,880	Rp 829,920			
	Aspol Kebun Kelapa						Rp 362,880	Rp 127,000	Rp 235,872			
	Aspol Dimpolair						Rp 3,752,000	Rp 1,313,200	Rp 2,438,800			
	Aspol Berimob Lingke						Rp 127,342,320	Rp 44,560,812	Rp 82,772,508			
	Aspol Punge						Rp 6,322,400	Rp 2,212,840	Rp 4,109,560			
	Aspol Kebun Kelapa						Rp 1,464,960	Rp 512,730	Rp 952,224			
	Aspol Ulhe Lec						Rp 1,276,800	Rp 446,880	Rp 829,920			
	Aspotek Kuta Alam						Rp 576,800	Rp 201,880	Rp 374,920			
	Aspotek Darussalam						Rp 257,600	Rp 90,160	Rp 167,440			
	Aspotek Krueang Raya						Rp 728,000	Rp 254,800	Rp 473,200			
	Aspotek Peukan Bada						Rp 151,200	Rp 52,920	Rp 98,280			
	Aspotek Pidie						Rp 13,244,000	Rp 4,635,400	Rp 8,608,600			
	Aspotek Aceh Barat						Rp 10,696,000	Rp 3,743,600	Rp 6,952,400			
	Aspotek Sama Tiga						Rp 576,800	Rp 201,880	Rp 374,920			
	Aspotek Teunom						Rp 151,200	Rp 52,920	Rp 98,280			
	Aspotek Setia Bakti						Rp 151,200	Rp 52,920	Rp 98,280			
	Aspotek Sampoinet						Rp 1,002,400	Rp 350,840	Rp 651,560			
	Aspotek Johan Pahlawan						Rp 576,800	Rp 201,880	Rp 374,920			
	Aspotek Krueang Sabé						Rp 728,000	Rp 254,800	Rp 473,200			
	Aspotek Krueang Raya						Rp 728,000	Rp 254,800	Rp 473,200			
	Aspotek Lhoknga						Rp 408,800	Rp 143,080	Rp 265,720			
	Aspotek Leupung						Rp 425,600	Rp 148,960	Rp 276,640			
	Aspotek Simulue						Rp 3,567,872	Rp 1,248,750	Rp 2,319,112			
	Aspotek Nias						Rp 3,837,720	Rp 1,343,200	Rp 2,494,520			
	Pengadaan Material						Rp 226,646,810	Rp 79,751,763	Rp 115,030,702	Rp 13,000,000	Rp 18,864,346	Rp
a.	Pengadaan Material Dasar						Rp 70,398,530	Rp 70,398,530				
b.	Peralatan Humas Polda NAD						Rp 553,700	Rp 553,700				
c.	Operasional Alat Transportasi						Rp 143,571,048	Rp 345,288	Rp 111,361,422	Rp 13,000,000	Rp 18,864,346	

TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Alat / Absus Sene Pokja NAD						Rp 12,123,503	Rp 8,454,223	Rp 3,669,288			
REFUNGSIONALISASI TNI							Rp 532,312,913	Rp 280,428,047.47	Rp 140,909,013.62	Rp 108,475,851.88	Rp -	Rp -
V	MABES TNI	MABES TNI					Rp 107,648,697	Rp 60,637,279	Rp 32,774,992	Rp 13,236,426	Rp -	Rp -
	A. BIDANG BEKAL UMUM						Rp 17,705,050	Rp 15,617,833	Rp 87,222	Rp -	Rp -	Rp -
	B. BIDANG ALPAL						Rp 66,080,097	Rp 22,396,433	Rp 32,217,981	Rp 11,465,683	Rp -	Rp -
	C. BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 3,860,320	Rp 2,619,788.48	Rp 469,788	Rp 1,770,743	Rp -	Rp -
	D. BIDANG KESEHATAN						Rp 7,680,724	Rp 7,680,724	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	E. BIDANG ALKOM						Rp 12,322,500	Rp 12,322,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VI	TNI AD	TNI AD					Rp 328,102,081	Rp 186,626,057	Rp 58,536,598	Rp 81,439,426	Rp -	Rp -
	A. BIDANG ALPAL						Rp 59,902,000	Rp 54,387,000	Rp 4,875,000	Rp 640,000	Rp -	Rp -
	B. BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 203,593,751	Rp 67,632,727	Rp 53,661,598	Rp 80,799,426	Rp -	Rp -
	C. BIDANG ALKOM						Rp 64,606,330	Rp 64,606,330	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VII	TNI AL	TNI AL					Rp 34,423,501	Rp 11,779,843	Rp 22,643,655	Rp -	Rp -	Rp -
	A. BIDANG BEKAL UMUM						Rp 170,747	Rp 93,433	Rp 77,313	Rp -	Rp -	Rp -
	B. BIDANG ALPAL						Rp 30,334,563	Rp 10,342,898	Rp 19,991,668	Rp -	Rp -	Rp -
	C. BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 3,668,841	Rp 1,094,167	Rp 2,574,674	Rp -	Rp -	Rp -
VIII	TNI AU	TNI AU					Rp 62,138,635	Rp 21,384,866	Rp 26,953,769	Rp 13,800,000	Rp -	Rp -
	A. BIDANG ALPAL						Rp 1,200,000	Rp 600,000	Rp 600,000	Rp -	Rp -	Rp -
	B. BIDANG FASKON (+ PPh 15%)						Rp 60,938,635	Rp 20,784,866	Rp 26,353,769	Rp 13,800,000	Rp -	Rp -

TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAERAH							Rp 176,779,000	Rp 54,875,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800	Rp 30,475,800
1	MOBILISASI PASUKAN TNI DARI LUAR NAD	TNI					Rp 18,700,000	Rp 18,700,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Personil						Rp 4,950,000	Rp 4,950,000				
	Peralatan						Rp 11,000,000	Rp 11,000,000				
	Alat Transportasi						Rp 2,750,000	Rp 2,750,000				
2	MOBILISASI PASUKAN POLRI DARI LUAR NAD	POLRI					Rp 127,379,000	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800
	Pengawasan personil BKO Polda NAD untuk menjaga keamanan Kamp dan masa rehab&eksos						Rp 127,379,000	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800	Rp 25,475,800
3	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN						Rp 30,700,000	Rp 10,700,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	Pemberdayaan Potensi Keamanan	BIN					Rp 25,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	DEPHAN					Rp 5,700,000	Rp 5,700,000				
PROGRAM DUKUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI							Rp 302,602,549	Rp 286,618,575	Rp 7,991,987	Rp 7,991,987	Rp -	Rp -
1	PEMBUKAAN DAERAH TERISOLASI	TNI					Rp 73,937,461	Rp 73,937,461	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Dukungan Operasional						Rp 3,389,044	Rp 3,389,044				
	Dukungan Peralatan						Rp 61,205,307	Rp 61,205,307				
	Pengadaan Ransum						Rp 9,343,114	Rp 9,343,114				
2	PEMBERSIHAN KOTA/DESA DARI PUNG	TNI					Rp 88,025,131	Rp 88,025,131	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dukungan Operasional						Rp 8,133,696	Rp 8,133,696				
	Dukungan Peralatan						Rp 61,205,307	Rp 61,205,307				
	Pengadaan Ransum						Rp 18,686,128	Rp 18,686,128				
3	PENGADAAN RUMAH SAKIT LAPANGAN	TNI					Rp 114,000,000	Rp 114,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan						Rp 114,000,000	Rp 114,000,000				
4	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN						Rp 26,639,987	Rp 10,655,983	Rp 7,991,987	Rp 7,991,987	Rp -	Rp -
	Dukungan Pelayanan TNI	TNI					Rp 14,530,886	Rp 5,812,354	Rp 4,359,264	Rp 4,359,264		
	Dukungan Pelayanan Polri	POLRI					Rp 12,109,071	Rp 4,843,629	Rp 3,632,723	Rp 3,632,723		
PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARAKAT							Rp 472,050,000	Rp 308,187,500	Rp 56,525,000	Rp 36,112,500	Rp 38,612,500	Rp 27,612,500
1	SUB PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	KOMINFO					Rp 38,925,000	Rp 19,562,500	Rp 10,425,000	Rp 3,012,500	Rp 3,012,500	Rp 2,912,500
a	Perencanaan dan Sosialisasi Kegiatan dan Materi Kampanye		Jakarta				Rp 500,000	Rp 500,000				
b	Dialog Antar Komponen Masyarakat		Jakarta - NAD				Rp 2,163,514	Rp 874,510	Rp 417,875	Rp 291,041	Rp 291,041	Rp 291,041
c	Kerjasama dengan Media Pers dan Penyiaran		Jakarta - NAD				Rp 10,803,061	Rp 9,483,061	Rp 528,000	Rp 264,000	Rp 264,000	Rp 264,000
d	Fasilitasi Jaringan Sosial Tradisional		NAD & NIAS				Rp 17,935,570	Rp 3,290,840	Rp 8,501,724	Rp 2,047,669	Rp 2,047,669	Rp 2,047,669
e	Advokasi dan Dialog Penanaman Nilai Demokrasi		NAD & NIAS				Rp 4,487,212	Rp 3,597,212	Rp 500,000	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 130,000
f	Evaluasi dan Monitoring		NAD & NIAS				Rp 3,033,644	Rp 1,816,872	Rp 477,401	Rp 279,790	Rp 279,790	Rp 179,790
2	SUB PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN		NAD & NIAS				Rp 105,000,000	Rp 27,000,000	Rp 20,600,000	Rp 21,100,000	Rp 23,600,000	Rp 12,700,000
a	Biabangan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Periwis	DEPDAGRI					Rp 38,000,000	Rp 13,000,000	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	Rp 10,500,000	Rp 2,500,000
b	Revisi Wawasan Kebangsaan	DEPDAGRI					Rp 29,000,000	Rp 7,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	Rp 6,500,000	Rp 5,000,000
c	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan	DEPDAGRI					Rp 8,000,000	Rp 2,500,000	Rp 4,300,000	Rp 1,100,000	Rp 100,000	Rp -
d	Sosialisasi Bidang Politik	DEPDAGRI					Rp 12,000,000	Rp 3,000,000	Rp 2,500,000	Rp 3,200,000	Rp 2,200,000	Rp 1,100,000
e	Pemantauan situasi perkembangan politik masyarakat	DEPDAGRI					Rp 6,000,000	Rp 1,500,000	Rp 1,300,000	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000	Rp 1,000,000
f	Pemantapan semangat Bela Negara	DEPHAN					Rp 12,000,000	Rp -	Rp 1,500,000	Rp 4,200,000	Rp 3,200,000	Rp 3,100,000
3	SUB PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT						Rp 303,125,000	Rp 249,125,000	Rp 13,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000
a	Fasilitasi Pelembagaan Forum Kemasyarakatan	DEPDAGRI	NAD & NIAS				Rp 35,000,000	Rp 5,000,000	Rp 7,000,000	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
b	Pendataan Ulang Kependudukan/Single Identity Number	DEPDAGRI	NAD				Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
c	Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ttg Insentive Framework	POLHUKAM	NAD				Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
d	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	DEPDAGRI	NAD				Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
e	Pembuatan Early Warning System	ELPI	NAD				Rp 3,500,000	Rp 2,500,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
f	Operasionalisasi EWS	DEPDAGRI	NAD				Rp 3,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
g	Desk Aceh	POLHUKAM	NAD				Rp 235,625,000	Rp 215,625,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
4	SUB PROGRAM PENGEMBANGAN PERAN DIPLOMASI	DEPLU	NAD				Rp 25,000,000	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	Rp -	Rp -	Rp -
a	Pemantapan Diplomasi Kemasyarakatan						Rp 12,500,000	Rp 6,250,000	Rp 6,250,000			
b	Peningkatan Diplomasi Kebencanaan						Rp 12,500,000	Rp 6,250,000	Rp 6,250,000			

**TABEL PENJADWALAN DAN INDIKASI PEMBIAYAAN
PROGRAM-PROGRAM BIDANG K3M**

NO.	URAIAN	INSTITUSI PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	INDIKASI PEMBIAYAAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
								2005	2006	2007	2008	2009
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL PEMBIAYAAN POKJA K3M							Rp 2,127,219,895	Rp 1,185,833,517	Rp 581,317,961	Rp 196,056,139	Rp 87,952,646	Rp 58,088,300